



LAPORAN
KEUANGAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TAHUN ANGGARAN
2020



AUDITED
BA 108

**BAGIAN ANGGARAN
108.01.422810**



LAPORAN KEUANGAN

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 04 Mei 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	49
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VI. Lampiran dan Daftar	62

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

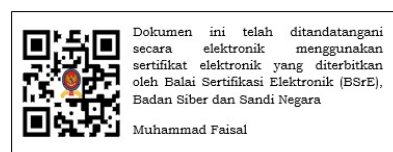
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk Tahun Anggaran 2020 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen KPPU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan perturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan diatas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 30 April 2021

Kepala Satuan Pengawasan Internal,



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 04 Mei 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua KPPU,

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp37.728.498.037 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp37.728.498.037 atau mencapai 119,22 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp31.647.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp113.228.643.932 atau mencapai 99,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp114.053.530.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp43.126.015.611 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp29.228.760.569; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.482.942.434 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp414.312.608.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.938.781.405 dan Rp40.187.234.206.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp121.769.374.200 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp215.066.330.038 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp93.296.955.838, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-

masing sebesar Rp32.068.151 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp93.329.023.989.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp54.204.567.687, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp93.329.023.989 kemudian dikurangi dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp600.000 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp79.312.290.508 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp40.187.234.206.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*NETTO*)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	31.647.000.000	37.728.498.037	119,22	39.090.354.630
JUMLAH PENDAPATAN		31.647.000.000	37.728.498.037	119,22	39.090.354.630
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	40.420.900.000	40.384.889.250	99,91	35.652.500.524
Belanja Barang	B.3	68.293.073.000	67.509.560.837	98,85	94.948.109.520
Belanja Modal	B.4	5.339.557.000	5.334.193.845	99,90	4.210.258.447
JUMLAH BELANJA		114.053.530.000	113.228.643.932	99,28	134.810.868.491

Jakarta, 04 Mei 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,

II. NERACA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NERACA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat	2020	2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	190.793.773
Piutang Bukan Pajak	C.2	419.961.782.396	335.340.958.705
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	(391.490.775.127)	(291.570.162.699)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.4	681.519.770	735.616.452
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	(528.066.999)	(464.948.692)
Persediaan	C.6	604.300.529	241.905.396
Jumlah Aset Lancar		29.228.760.569	44.474.162.935
ASET TETAP			
Tanah	C.7	1.987.200.000	1.987.200.000
Peralatan dan Mesin	C.8	32.656.872.202	28.793.016.373
Gedung dan Bangunan	C.9	173.700.000	173.700.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	2.977.950.406	3.171.148.246
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(24.312.780.174)	(21.745.221.059)
Jumlah Aset Tetap		13.482.942.434	12.379.843.560
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	1.237.413.863	931.099.863
Aset Lain-Lain	C.13	55.650.000	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(878.751.255)	(732.537.038)
Jumlah Aset Lainnya		414.312.608	198.562.825
JUMLAH ASET		43.126.015.611	57.052.569.320
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.15	115.812.409	14.238.864
Pendapatan Diterima Dimuka	C.16	2.822.968.996	2.642.968.996
Uang Muka dari KPPN	C.17	-	190.793.773
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.938.781.405	2.848.001.633
JUMLAH KEWAJIBAN		2.938.781.405	2.848.001.633
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	40.187.234.206	54.204.567.687
JUMLAH EKUITAS		40.187.234.206	54.204.567.687
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		43.126.015.611	57.052.569.320

Jakarta, 04 Mei 2021
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2020	2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	121.769.374.200	215.734.742.776
Jumlah Pendapatan		121.769.374.200	215.734.742.776
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	40.384.304.250	35.652.500.524
Beban Persediaan	D.3	2.427.819.895	2.910.756.801
Beban Barang dan Jasa	D.4	39.058.161.096	38.857.018.538
Beban Pemeliharaan	D.5	3.886.389.146	3.193.826.268
Beban Perjalanan Dinas	D.6	25.733.807.308	51.284.419.830
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.592.117.608	3.482.093.971
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.8	99.983.730.735	139.403.515.234
Jumlah Beban		215.066.330.038	274.784.131.166
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(93.296.955.838)	(59.049.388.390)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.9	(226.184.792)	104.422.757
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	194.116.641	85.357.814
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(32.068.151)	189.780.571
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(93.329.023.989)	(58.859.607.819)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(93.329.023.989)	(58.859.607.819)

Jakarta, 04 Mei 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua KPPU,

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2020	2019
EKUITAS AWAL	E.1	54.204.567.687	16.155.332.259
Surplus/Defisit-LO	E.2	(93.329.023.989)	(58.859.607.819)
Transaksi Antar Entitas	E.3	79.312.290.508	96.908.843.247
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.4	(14.017.333.481)	38.049.235.428
EKUITAS AKHIR	E.5	40.187.234.206	54.204.567.687

Jakarta, 04 Mei 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua KPPU,

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengawasan kegiatan persaingan usaha yang sehat. Organisasi dan tata kerja KPPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Struktur organisasi dan tugas pokok Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Entitas berkedudukan di Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat.

KPPU mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui peran tersebut diharapkan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang sehat yang akan melahirkan efisiensi dan mendorong timbulnya inovasi yang akan berujung pada kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkomitmen dengan visi "*Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong*".

Dalam pencapaian Visi KPPU tersebut, maka KPPU melaksanakan Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

KPPU terdiri atas:

1. Komisioner
Komisioner memiliki fungsi penanggung jawab yang memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU.
2. Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi.
3. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi
Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi adalah unsur penyelenggara teknis di bidang pengkajian ekonomi, analisis kebijakan publik dan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.
4. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum
Kedeputian Bidang Penegakan Hukum adalah unsur penyelenggara teknis di bidang penegakan hukum praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan kemitraan.
5. Satuan Pengawasan Internal
Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja dalam organisasi Komisi.
6. Kepaniteraan
Kepaniteraan adalah unsur pendukung Komisi dalam penyelenggaraan Sidang Majelis Komisi dan perancangan Putusan Komisi.
7. Kelompok Kerja
Kelompok Kerja adalah unsur pendukung Komisioner yang terdiri dari individu-individu yang berpengalaman dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan dalam menangani perkara tertentu dan dalam waktu tertentu.

8. Kelompok Staf Ahli
Kelompok Staf Ahli adalah unsur pendukung Komisioner di bidang keahlian tertentu, yang berada dan bertanggung jawab kepada Komisi.
9. Kantor Wilayah
Kantor Wilayah adalah unsur pendukung Komisi di bidang administrasi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi di daerah.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis
Akrual*

A.2 Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Mulai Tahun 2015 KPPU telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPU. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan Aset Lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Operasional serta Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4 Basis Akuntansi

KPPU menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPPU dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KPPU. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPPU adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada KPPU adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Denda Persaingan Usaha diakui saat putusan telah berkekuatan hukum tetap.
 - Pendapatan Denda Ikatan Dinas diakui setelah pegawai yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda Ikatan Dinas.
 - Pendapatan atas pelunasan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh pegawai yang bersangkutan atau pada saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan.
 - Pendapatan Lain-lain diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN untuk piutang Ikatan Dinas dan TGR, sementara untuk Piutang Denda Persaingan Usaha diserahkan kepada Pengadilan Negeri	

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a. sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 untuk Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Renovasi Peralatan dan Mesin.
 - b. sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 untuk Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan.
 - c. Pengeluaran untuk BMN aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, tidak dilakukan kapitalisasi.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset Tak Berwujud, Aset Kerjasama Dengan Pihak Ketiga (kemitraan), Kas yang Dibatasi Penggunaannya, Deposit Apartemen yang belum disetorkan ke Kas Negara.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- Deposit apartemen merupakan dana yang tersimpan di pemilik. Dana tersebut dapat digunakan apabila terdapat kekurangan pembayaran layanan daya dan jasa, kerusakan serta kehilangan pada fasilitas apartemen. Sesuai dengan yang diatur dalam SPK

Perjanjian Sewa Apartemen, deposit dapat dikembalikan ke Kas Negara maksimal 60 hari kalender.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pada Tahun 2020, BPK melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan KPPU TA 2019. Dalam pemeriksaan itu BPK menjelaskan bahwa KPPU tidak memiliki juknis penyisihan piutang denda persaingan usaha tersendiri yang memperhatikan *nature* dan kondisi piutang denda persaingan usaha. Untuk itu pada tahun 2020, KPPU telah berkoordinasi

dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengeluarkan Surat Nomor S-775/PB/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Denda Persaingan Usaha di KPPU yang memuat rekomendasi perhitungan penyisihan piutang dengan perhitungan sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Penyisihan	Perhitungan Penyisihan Piutang
Lancar	0,50%	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo. Keterangan: Penjelasan tentang jatuh tempo, baik jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan titik jatuh temponya akan dijelaskan lebih lanjut oleh KPPU dalam petunjuk teknis/proses bisnis.
Kurang Lancar	10%	90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang pertama (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).
Diragukan	50%	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang kedua (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).
Macet	100%	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang ketiga (sejak surat diterima oleh pelaku usaha). Keterangan: Proses untuk pelaksanaan putusan tidak terkait dengan usaha kegiatan proses eksekusi, sehingga tidak perlu dicantumkan pada penentuan kualitas piutang.

Aturan perhitungan kebijakan penyisihan piutang tersebut diatas mulai berlaku pada 1 Januari 2021 sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

*Dampak
Pandemi
COVID-19*

A.7 Dampak Pandemi COVID-19

Tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak dari Pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi anggaran dan realisasi KPPU termasuk proyeksi penerimaan PNBPN serta tingkat ketertagihan Piutang Bukan Pajak KPPU TA 2020.

A.8 Capaian Output Strategis dan LRA Belanja COVID 19

Capaian Output Strategis KPPU selama TA 2020 (rincian terlampir):

Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
06	Program Pengawasan Persaingan Usaha	Rp114.053.530.000	Rp113.228.643.932	99,28	320,65	344,15	107,33

Rincian Laporan Realisasi Belanja Khusus Akun Covid-19 KPPU selama TA 2020:

KODE	ANGGARAN	REALISASI BELANJA			%	SISA ANGGARAN
		BELANJA	PENGENBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
52 5211 521131	818.254.000	784.648.440	10.000	784.638.440	95,89	33.615.560
	818.254.000	784.648.440	10.000	784.638.440	95,89	33.615.560
5212 521241	1.574.209.000	1.556.721.932	1.090.520	1.555.631.412	98,82	18.577.588
	1.574.209.000	1.556.721.932	1.090.520	1.555.631.412	98,89	18.577.588
5221 522192	1.439.010.000	1.397.854.000	-	1.397.854.000	97,14	41.156.000
	1.439.010.000	1.397.854.000	-	1.397.854.000	97,14	41.156.000
5231 523114	6.600.000	6.477.000	-	6.477.000	98,14	123.000
	6.600.000	6.477.000	-	6.477.000	98,14	123.000
5241 524115	1.017.026.000	1.012.950.000	4.050.000	1.008.900.000	99,20	8.126.000
	1.017.026.000	1.012.950.000	4.050.000	1.008.900.000	99,60	8.126.000
	4.855.099.000	4.758.651.372	5.150.520	4.753.500.852	98,01	101.598.148

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Uraian	2020	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12.000.000.000	31.647.000.000
Jumlah Pendapatan	12.000.000.000	31.647.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	33.293.683.000	40.420.900.000
Belanja Barang	96.447.181.000	68.293.073.000
Belanja Modal	597.725.000	5.339.557.000
Jumlah Belanja	130.338.589.000	114.053.530.000

Rincian Perubahan Target PNBP

Uraian	Nilai	Dasar Hukum	Tanggal
Semula	12.000.000.000	DIPA	12 September 2019
Revisi 1	25.682.666.000	Perpres 72 Tahun 2020	Tanggal 25 Juni 2020
Revisi 2	31.647.000.000	S-206/AG/AG.3/2020	Tanggal 27 Oktober 2020

Rincian Perubahan Anggaran Belanja

Uraian	DIPA Awal 12 Sept 19	Revisi 3 DIPA 27 April 2020	Revisi 4 DIPA 30 Sept 2020	Revisi 6 DIPA 18 Nov 2020
Belanja RM	125.058.589.000	97.807.521.000	104.276.530.000	104.276.530.000
Belanja PNBP	5.280.000.000	5.280.000.000	5.277.000.000	9.777.000.000
Total Pagu	130.338.589.000	103.087.521.000	109.553.530.000	114.053.530.000
<i>Penghematan/ Revisi</i>		<i>(27.251.068.000)</i>	<i>6.466.009.000</i>	<i>4.500.000.000</i>

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020, KPPU melakukan revisi penghematan anggaran sebesar Rp27.251.068.000.

Selanjutnya, mengingat terdapat kekurangan belanja pegawai KPPU TA 2020, maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-249/MK.2/2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA KPPU (BA 108) untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai KPPU TA 2020, KPPU melakukan revisi penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp6.466.009.000.

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-206/AG/AG.3/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pengesahan Revisi Anggaran KPPU, KPPU melakukan revisi penambahan pagu penggunaan PNBP dari semula Rp5.280.000.000 menjadi sebesar Rp9.777.000.000.

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp37.728.498.037

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp37.728.498.037 atau mencapai 119,22 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp31.647.000.000. Pendapatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp37.728.498.037 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2020

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	31.647.000.000	37.728.498.037	119,22
Jumlah	31.647.000.000	37.728.498.037	119,22

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 3,48 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	37.728.498.037	39.090.354.630	(3,48)
Jumlah	37.728.498.037	39.090.354.630	(3,48)

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Rp37.728.498.037

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing- masing sebesar Rp37.728.498.037 dan Rp39.090.354.630. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2020 mengalami penurunan sebesar 3,48 persen dari TA 2019 terjadi karena menurunnya pembayaran Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha. Pembayaran tidak dilakukan tepat waktu karena banyaknya debitur yang terkena dampak COVID 19. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	37.728.498.037	39.090.354.630	(3,48)
Jumlah	37.728.498.037	39.090.354.630	(3,48)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Perbandingan PNBP Lainnya

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	103.544.998	311.229.999	(66,73)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	4.135.200	4.019.600	2,88
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	149.096.682	91.435.976	63,06
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	630.000	-	100
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	37.369.898.638	38.563.210.702	(3,09)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	101.192.519	113.431.133	(10,79)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	7.027.220	(100)
Jumlah	37.728.498.037	39.090.354.630	(3,48)

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Rp113.228.643.932

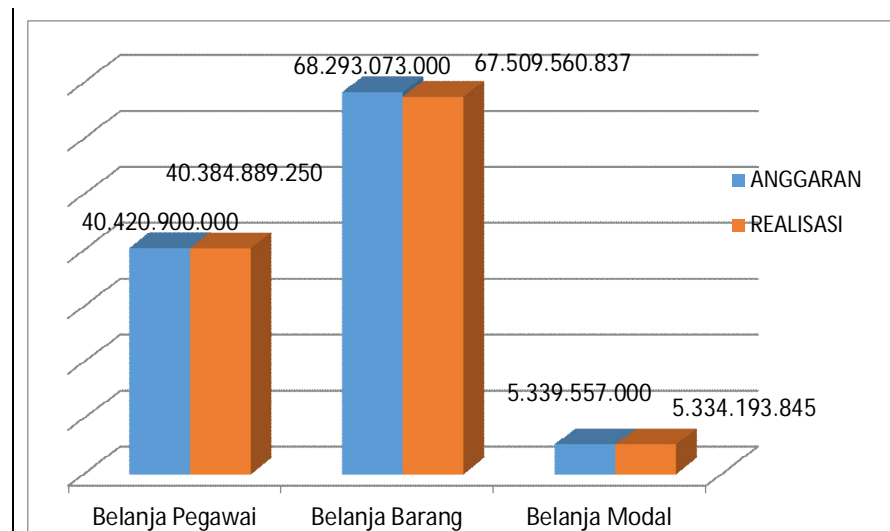
Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp113.228.643.932 atau 99,28 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.114.053.530.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2020*

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	40.420.900.000	40.384.889.250	99,91
Belanja Barang	68.293.073.000	67.509.560.837	98,85
Belanja Modal	5.339.557.000	5.334.193.845	99,90
Jumlah	114.053.530.000	113.228.643.932	99,28

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Grafik A. Komposisi Realisasi Belanja Negara Neto
Per 31 Desember 2020*



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,01 persen karena terdapatnya penyesuaian honorarium pegawai serta pembelian peralatan dan mesin. Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019:

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Pegawai	40.384.889.250	35.652.500.524	13,27
Belanja Barang	67.509.560.837	94.948.109.520	(28,90)
Belanja Modal	5.334.193.845	4.210.258.447	26,70
Jumlah	113.228.643.932	134.810.868.491	(16,01)

B.3 Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp40.384.889.250*

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp40.384.889.250 atau 99,92 persen dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp40.420.900.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

URAIAN	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Uang Honor Tetap	40.420.900.000	40.389.469.600	99,92
Jumlah Belanja kotor	40.420.900.000	40.389.469.600	99,92
Pengembalian Belanja	0	4.580.350	0
Jumlah Belanja	40.420.900.000	40.384.889.250	99,91

Pagu anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar Rp40.420.900.000 mengalami kenaikan sebesar Rp4.252.669.000 dari Tahun 2019 sebesar Rp36.168.231.000.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp40.384.889.250 sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp35.652.500.524. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,27 persen dibandingkan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terdapatnya penyesuaian besaran honorarium pegawai sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-350/MK.02/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Uang Honor Tetap	40.389.469.600	35.652.500.524	13,29
Jumlah Belanja kotor	40.389.469.600	35.652.500.524	13,29
Pengembalian Belanja	4.580.350	-	-
Jumlah Belanja	40.384.889.250	35.652.500.524	13,27

Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp4.580.350 terjadi karena KPPU kelebihan membayar Penghasilan Ketiga Belas Pegawai Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Dede Suhendar, Nurzanah dan Rustan sesuai dengan lampiran PP Nomor 44 Tahun 2020 pada latar belakang pendidikan dan masa kerja.

B.4 Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang
Rp67.509.560.837*

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp67.509.560.837 atau 98,85 persen dari anggaran Belanja Barang sebesar Rp68.293.073.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

URAIAN	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang Operasional	3.399.211.000	3.261.507.500	95,94
Belanja Barang Non Operasional	5.407.753.000	5.306.582.180	98,12
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.910.922.000	2.906.086.385	99,83

URAIAN	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Jasa	26.794.643.000	26.545.434.587	99,06
Belanja Pemeliharaan	3.767.587.000	3.765.818.542	99,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	26,005.980.000	25.851.405.565	99,40
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.977.000	6.976.199	99,98
Jumlah Belanja kotor	68.293.073.000	67.643.810.958	99,04
Pengembalian Belanja	0	134.250.121	0
Jumlah Belanja	68.293.073.000	67.509.560.837	98,85

Pagu anggaran Belanja Barang Tahun 2020 sebesar Rp68.293.073.000 mengalami penurunan sebesar Rp27.941.068.000 dari Tahun 2019 sebesar Rp96.234.141.000.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp67.509.560.837 sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp94.948.109.520. Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 tersebut mengalami penurunan sebesar 28,90 persen dibandingkan realisasi Belanja Barang Tahun 2019.

Sebagai dampak dari Pandemic COVID-19 KPPU melakukan pencegahan penyebaran virus dengan menyediakan masker, hand sanitizer dan disinfektan. Selain itu KPPU juga melakukan perubahan postur anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 dengan meminimalisir perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Barang Operasional	3.261.507.500	2.396.170.756	36,11
Belanja Barang Non Operasional	5.306.582.180	5.275.411.660	0,59
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.906.086.385	2.956.356.263	(1,70)
Belanja Jasa	26.545.434.587	30.059.168.413	(11,69)
Belanja Pemeliharaan	3.765.818.542	3.033.717.453	24,13
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	25.851.405.565	47.898.550.129	(46,03)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	6.976.199	4.049.736.814	(99,83)
Jumlah Belanja Kotor	67.643.810.958	95.669.111.488	(29,29)
Pengembalian Belanja	134.250.121	721.001.968	(81,38)
Jumlah Belanja	67.509.560.837	94.948.109.520	(28,90)

B.5 Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal
Rp5.334.193.845*

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.334.193.845 atau 99,89 persen dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp5.339.557.000. Rincian pagu anggaran dan realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2020 tersaji sebagai berikut:

URAIAN	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.764.629.000	4.761.547.295	99,93
Belanja Modal Lainnya	574.928.000	572.646.550	99,60
Jumlah Belanja	5.339.557.000	5.334.193.845	99,89

Pagu anggaran Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp5.339.557.000 mengalami kenaikan sebesar Rp1.110.899.000 dari Tahun 2019 sebesar Rp4.228.658.000.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.334.193.845 sementara itu untuk realisasi pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp4.210.258.447. Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 tersebut mengalami Kenaikan sebesar 26,70 persen dibandingkan realisasi Belanja

Modal Tahun 2019 disebabkan karena terdapatnya pengeluaran yang signifikan yaitu pembelian 126 buah Komputer Unit sebesar Rp1.863.687.826 serta 198 Buah Alat Rumah Tangga sebesar Rp955.899.397.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.761.547.295	2.598.464.449	83,24
Belanja Modal Lainnya	572.646.550	1.611.793.998	(64,47)
Jumlah Belanja	5.334.193.845	4.210.258.447	26,70

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4.761.547.295

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.761.547.295 dan Rp2.598.464.449, mengalami kenaikan sebesar 83,24 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan oleh Pembelian Komputer Unit, Alat Komunikasi, serta Alat Rumah Tangga.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.761.547.295	2.598.464.449	83,24
Jumlah Belanja	4.761.547.295	2.598.464.449	83,24

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

*Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp572.646.550*

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp572.646.550 dan Rp1.611.793.998, mengalami penurunan sebesar 64,47 persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Belanja Modal Lainnya terdiri dari renovasi ruang kantor KPPU Kanwil II Lampung sebesar Rp256.982.250 dan pembelian software sebesar Rp315.664.000.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya.

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	%
Belanja Modal Lainnya	572.646.550	1.611.793.998	(64,47)
Jumlah Belanja	572.646.550	1.611.793.998	(64,47)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp190.793.773. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Rekening BRI	0	190.793.773	(100)
Jumlah	0	190.793.773	(100)

*Piutang Bukan Pajak
Rp419.961.782.396*

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp419.961.782.396 dan Rp335.340.958.705. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Jenis Piutang	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Piutang Lainnya	52.796.250	6.682.921	690,02
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	419.908.986.146	335.334.275.784	25,22
Jumlah	419.961.782.396	335.340.958.705	25,23

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak KPPU berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Lainnya.

Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 47 disebutkan bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan atau membatalkan perilaku yang telah terbukti melanggar hukum persaingan usaha, penetapan ganti rugi dan dapat juga berupa denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000 dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000 yang harus disetorkan ke Kas Negara. Dengan demikian, KPPU mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam bentuk denda.

Dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Berdasarkan definisi tersebut, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di KPPU tahun 2008 merekomendasikan agar KPPU mencatat semua potensi penerimaan negara yang menjadi kewajiban pihak lain untuk membayarnya (dalam hal ini denda pelanggaran persaingan usaha) dalam bentuk piutang. Untuk itu, sejak tahun 2008 denda pelanggaran persaingan usaha yang belum dibayarkan ke Kas Negara oleh pelaku usaha sesudah tanggal jatuh tempo denda dicatat dalam Neraca Laporan Keuangan KPPU dalam akun Piutang Bukan Pajak.

Dalam pencatatan Piutang Bukan Pajak, KPPU berpedoman pada peraturan yang berlaku terkait dengan pencatatan piutang bukan pajak, antara lain PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Namun demikian, pencatatan Piutang Negara Bukan Pajak pada KPPU tetap disesuaikan dengan kondisi piutang yang dikelola KPPU dan koridor yang digariskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan rekomendasi BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan KPPU TA 2016, maka KPPU telah menyusun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Kebijakan Akuntansi tersebut salah satunya mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Piutang KPPU yang bersifat spesifik.

Mutasi Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel di berikut ini:

Saldo per 31 Desember 2019	335.340.958.705
Mutasi Tambah:	
- Penambahan Putusan Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha	121.764.609.000
- Penambahan Piutang Lainnya	52.796.250
Mutasi Kurang:	
- Pembayaran Piutang Denda Pelanggaran Persaingan Usaha	37.189.898.638
- Pembayaran Piutang Lain-Lain	6.682.921
Saldo per 31 Desember 2020	419.961.782.396

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan piutang bukan pajak sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan Piutang Bukan Pajak berupa:
 - a. penambahan putusan denda persaingan usaha yang telah inkraht per 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp121.764.609.000;
 - b. Penambahan piutang lainnya atas penyetoran pengembalian belanja TA 2020 yang baru disetorkan ke kas Negara pada Tahun 2021 sebesar Rp52.796.250;
2. Terdapat pengurangan Piutang Bukan Pajak berupa:
 - a. Pembayaran piutang denda pelanggaran persaingan usaha dari pelaku usaha per 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp37.189.898.638. Nilai tersebut terdiri atas pembayaran yang dilakukan dengan cara mengangsur dan lunas;
 - b. Pembayaran piutang lainnya yang terdiri atas:

Pembayaran piutang lainnya atas penyetoran pengembalian belanja TA 2019 yang baru disetorkan ke kas Negara pada Tahun 2020 sebesar Rp6.682.921;

Selain itu pada Laporan Keuangan KPPU per 31 Desember 2020 terdapat beberapa informasi yang dapat disampaikan yaitu terdapat 12 setoran dengan total sebesar Rp180.000.000 yang belum dibukukan sebagai pengurang piutang KPPU. Pelaku usaha tersebut

sudah membayar denda pelanggaran persaingan usaha namun putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas penerimaan tersebut KPPU mencatatnya sebagai Pendapatan Diterima di Muka, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Tanggal Bayar	NTPN	Nilai	No Putusan
PT Trafoindo Prima Perkasa	15-01-2020	5F2608N3D E1IEMC9	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	24-02-2020	EFFCC8N3D E4P15S1	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	16-03-2020	420313CIE EP78N4P	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	17-04-2020	085402G4U K9TBQU4	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	14-05-2020	D5C798N3 DEDI709P	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	11-06-2020	6776861QT UP5SOBA	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	21-07-2020	82FCC2G4U KITM0IG	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	11-08-2020	5CB6C48VU 9QBNOAC	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	10-09-2020	4CD913CIE FATVSF3	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	09-10-2020	8E9E42G4U KRHUPIQ	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	13-11-2020	DFDD561Q TV86NM8I	15.000.000	07/KPPU-L/2015
PT Trafoindo Prima Perkasa	10-12-2020	FE6BD7QLT KFQ9834	15.000.000	07/KPPU-L/2015
		Total	180.000.000	

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp391.490.775.127

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp391.490.775.127 dan Rp291.570.162.699. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2020*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	52.796.250	0,5%	263.981
Kurang Lancar	18.955.000.000	10%	1.895.500.000
Diragukan	22.717.950.000	50%	11.358.975.000
Macet	378.236.036.146	100%	378.236.036.146
Jumlah	419.961.782.396		391.490.775.127

C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp681.519.770*

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp681.519.770 dan Rp735.616.452. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Nama	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Bagian Lancar TP/TGR	681.519.770	735.616.452	7,35
Jumlah	681.519.770	735.616.452	7,35

Piutang Tagihan TP/TGR di KPPU berasal dari:

1. Denda ikatan dinas yang dikenakan KPPU kepada para pegawai yang mengundurkan diri dari KPPU selama masa ikatan dinas pegawai yang bersangkutan belum berakhir. Para pegawai tersebut wajib membayar ke kas negara sesuai dengan perjanjian

kerja yang telah disepakati sebelumnya dengan KPPU. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp601.657.000;

2. TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2013, yaitu terdapat penetapan jumlah Staf Pengelola Anggaran yang melebihi Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 serta kelebihan pembayaran honorarium kegiatan Tim Penyelarasan Program/Kegiatan KPPU. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Ketua KPPU agar memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk menginstruksikan kepada petugas pengelola keuangan Tahun 2013 agar mengembalikan honorarium sebesar Rp208.560.000 ke kas Negara dan Tim Penyelarasan Program/Kegiatan KPPU Tahun 2013 agar mengembalikan kelebihan honorarium sebesar Rp12.800.000 ke kas Negara. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.159.913;
3. TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2016 sebesar Rp7.792.875. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp912.500.
4. TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2017 sebesar Rp103.212.000. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp46.630.000;
5. TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU Tahun 2018 sebesar Rp27.460.357. Nilai *Outstanding* Piutang TGR Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.160.357.

Beberapa hal yang dapat dijelaskan terkait Piutang tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pencatatan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengikuti peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana telah

dijelaskan dalam C.3 Piutang Bukan Pajak;

2. Berdasarkan masa jatuh tempo, Piutang Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Penggolongan piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang ditentukan oleh jangka waktu pembayaran piutang yang disepakati antara debitur dengan KPPU (dalam bentuk Surat Pernyataan Kesiediaan Pembayaran Biaya Ikatan Dinas dan SKTJM);
3. Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan ke dalam piutang jangka pendek dibukukan di neraca sebagai akun Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (aset lancar). Sedangkan Piutang yang berasal dari Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU yang digolongkan ke dalam piutang jangka panjang dibukukan di neraca sebagai akun Tagihan TP/TGR (Aset Lainnya);
4. Pengukuran Piutang sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Piutang, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai piutang jangka panjang terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. Perhitungan penyisihan piutang untuk Denda Ikatan Dinas dan TGR berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan KPPU mengacu kepada PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara”.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila sampai dengan

penagihan ketiga, debitur tidak melakukan pelunasan pembayaran TGR dan denda ikatan dinas, maka KPPU dapat melimpahkan penagihannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I Kementerian Keuangan.

Rincian lengkap disajikan dalam lampiran.

C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp528.066.999

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp528.066.999 dan Rp464.948.692. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Per 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	105.500.000	0,5%	527.500
Kurang Lancar	27.072.857	10%	2.707.286
Diragukan	48.229.400	50%	24.114.700
Macet	500.717.513	100%	500.717.513
Jumlah	681.519.770		528.066.999

C.6 Persediaan

Persediaan Rp604.300.529

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp Rp604.300.529 dan Rp241.905.396. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Barang Konsumsi	589.873.414	238.415.286	147,40
Bahan untuk Pemeliharaan	14.427.115	3.490.110	313,37
Jumlah	604.300.529	241.905.396	149,80

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.7 Tanah

*Tanah
Rp1.987.200.000*

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.987.200.000 dan Rp1.987.200.000. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada nilai tanah seperti dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1.987.200.000
Mutasi tambah:	
Perolehan Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2020	1.987.200.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	1.987.200.000

Tanah yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan perolehan lainnya dari Eks PT PPA Persero sesuai dengan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor BA-18/KN.5/2018 tanggal 26 Juli 2018. Lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Adityawarman Nomor 85 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur dengan luas tanah seluruhnya sebesar 216 m².

Terkait dengan tindak lanjut perolehan tanah, gedung dan bangunan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun Anggaran 2018, KPPU mendapatkan asset berupa

Tanah, Gedung dan Bangunan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sub Direktorat Penilaian Kekayaan Negara Sistem Informasi (PKNSI) dengan total asset sebesar Rp2.160.900.000. Nilai tersebut telah dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN berdasarkan Dokumen Sumber Berita Acara Serah Terima Nomor BA 18/KN.05/2018 Tanggal 26 Juli 2018.

- 2) Tindak lanjut perolehan tanah, gedung dan bangunan dapat sampai dengan 31 Desember 2019 disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 Februari 2019, KPPU telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya melalui surat Nomor 50/SJ/S/II/2019 perihal Permohonan Klarifikasi Tanah dan Bangunan yang telah diserahkan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kepada KPPU pada tanggal 26 Juli 2018.
 - b. Pada tanggal 16 Mei 2019, KPPU menerima surat balasan Nomor 593/3980/436.7.11/2019 dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang menyampaikan bahwa "Tanah yang terletak di Jl. Adityawarman No.85 Surabaya merupakan asset Pemerintah Kota Surabaya".
 - c. Berdasarkan hal tersebut, maka KPPU tidak dapat melaksanakan proses selanjutnya berupa pengurusan sertifikasi dan pembangunan gedung. KPPU akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DJKN serta Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - d. Pada tanggal 31 Juli 2019 KPPU melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q Direktorat Penilaian Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) yang diwakili oleh Kepala Seksi PKN II terkait dengan hasil koordinasi yang telah dilakukan oleh KPPU kepada Pemerintah Kota Surabaya. Dalam koordinasi tersebut Kepala Seksi PKN II menjelaskan

- bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki beberapa "Surat Hijau", termasuk salah satunya tanah yang dimiliki KPPU dari DJKN yang berlokasi di Jl. Adityawarman No.85 Surabaya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Penggunaan Lahan (HPL) yang tidak memiliki sertifikatnya, tetapi yang hanya ada hak pemanfaatan atas tanah. KPPU disarankan untuk berkordinasi dengan mengirimkan surat yang menjelaskan mengenai detail kronologi perolehan asset tersebut yang ditujukan kepada Direktur PKNSI agar mendapatkan penjelasan tentang status asset tersebut.
- e. KPPU telah mengirimkan surat kepada Direktur Penilaian Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) terkait status asset tanah dan bangunan. Namun sampai akhir Tahun Anggaran 2019 belum ada jawaban dari Direktur Penilaian Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).
- 3) Tindak lanjut perolehan tanah, gedung dan bangunan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan Laporan ini disusun disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pada Audit Laporan Barang Milik Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam catatan rekomendasinya menyampaikan bahwa KPPU harus menyelesaikan permasalahan Asset BMN di Surabaya dengan berkoordinasi kepada DJKN, PKNSI, dan Pemkot Surabaya.
 - b. KPPU telah melakukan proses Permohonan Penetapan BMN *Idle* atas Aset Tanah dan Bagunan tersebut, sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal KPPU Nomor 111/SJ/S/X/2020 Tanggal 07 Oktober 2020 yang didasarkan pada Surat Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) Nomor S-369/KN.5/2020 Tanggal 02 April 2020.
 - c. KPPU telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Kepala Biro SDM dan Umum Nomor 208/SJ.4/S/XI/2020 Tanggal 04 November 2020.

- d. Pada tanggal 22 Januari 2021 Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya dalam suratnya Nomor 593/584/436.7.11/2021 menyatakan bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat nomor 593/3980/436.7.11/2019 tanggal 16 Mei 2019 "tanah yang terletak di Jl. Adityawarman No.85 Surabaya merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya;
- e. Sesuai dengan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Nomor S-44/KN/KN.5/2021 tanggal 5 Februari 2021 hal Tindak Lanjut Permasalahan BMN pada KPPU di Jalan Adityawarman No.85 Surabaya, dijelaskan bahwa :
- Usulan penetapan BMN idle dapat diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V.
 - Dalam hal KPPU masih membutuhkan gedung kantor di wilayah Surabaya, DJKN mengusulkan 2 (dua) pilihan asset BMN eks BPPN untuk dipertimbangkan sebagai gedung kantor KPPU.
- KPPU akan segera menindaklanjuti usulan penetapan BMN *idle* sesuai dengan Surat Dirjen KN tersebut.

Selain itu dapat kami sampaikan sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 BAB II Pasal 5 disebutkan bahwa Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset dilakukan untuk aset yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian, Tanah yang dimiliki oleh KPPU tidak termasuk kedalam aset yang harus direvaluasi karena diperoleh Tahun 2017.

C.8 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin
Rp32.656.872.202*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp32.656.872.202 dan Rp28.793.016.373. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	28.793.016.373
Mutasi tambah:	
Pembelian	4.761.547.295
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	897.691.466
Saldo per 31 Desember 2020	32.656.872.202
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(24.250.877.086)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	8.405.995.116

Mutasi tambah berupa pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp215.000.000
2. Alat Ukur sebesar Rp23.320.000
3. Alat Kantor sebesar Rp376.348.901
4. Alat Rumah Tangga sebesar Rp950.014.397
5. Alat Studio sebesar Rp564.553.295
6. Alat Komunikasi sebesar Rp193.931.500
7. Unit Alat Laboratorium sebesar Rp8.780.750
8. Komputer Unit sebesar Rp1.863.687.826
9. Peralatan Komputer sebesar Rp565.910.626

mutasi kurang berupa penghentian aset dari penggunaan:

1. Alat Kantor sebesar Rp83.339.118
2. Alat Rumah Tangga sebesar Rp404.081.840
3. Alat Studio sebesar Rp6.000.000
4. Alat Komunikasi sebesar Rp49.368.000
5. Unit Alat Laboratorium sebesar Rp3.289.000
6. Alat Laboratorium Fisika sebesar Rp1.502.000
7. Komputer Unit sebesar Rp288.560.288
8. Peralatan Komputer sebesar Rp61.551.220

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2020 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp173.700.000 dan Rp173.700.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan
Bangunan
Rp173.700.000

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2020	173.700.000
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2020	173.700.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(56.118.463)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	117.581.537

Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan kesatuan dari perolehan lainnya berupa Tanah dari Eks PT PPA Persero sesuai dengan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor BA-18/KN.5/2018 tanggal 26 Juli 2018 dengan Nomor Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 188.45/593-91/402.5.09/1993 Tanggal IMB 12 April 1993. Lokasi gedung dan bangunan tersebut terletak di Jalan Adityawarman Nomor 85 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur dengan Luas Bangunan sebesar 97 M² serta terdiri dari 1 Lantai. Terkait dengan tindak lanjut perolehan tanah, gedung dan bangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam C.8 Tanah.

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp.2.977.950.406

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp2.977.950.406 dan Rp3.171.148.246. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	3.171.148.246
Mutasi tambah:	
Pembelian	256.982.550
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	301.032.600
Transfer Keluar	149.147.790
Saldo per 31 Desember 2020	2.977.950.406
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(5.637.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.972.312.906

Mutasi tambah berupa pembelian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian berupa Pekerjaan Renovasi atas Kanwil Lampung sebesar Rp256.982.548. Atas aset renovasi tersebut akan dilakukan proses Serah Terima pada Tahun 2021.

Mutasi kurang berupa penghapusan dan transfer keluar sebagai berikut:

1. Penghapusan berupa hibah hasil pekerjaan renovasi Kanwil Bandung sebesar Rp301.032.600.
2. Transfer keluar hasil pekerjaan renovasi Kanwil Makassar sebesar Rp149.147.790.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat yang tertuang pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. Gedung dan Bangunan;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan Alat Musik Modern.

Namun terhadap Aset Tetap Renovasi, kami belum melakukan penyusutan karena belum ada perangkat (aplikasi) dari Kementerian Keuangan untuk mewisadahi perhitungan penyusutan tersebut.

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp24.312.780.174*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp24.312.780.174 dan Rp21.745.221.059. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	32.656.872.202	(24.251.024.211)	8.405.847.991
2	Gedung dan Bangunan	173.700.000	(56.118.463)	117.581.537
3	Aset Tetap Lainnya	2.977.950.406	(5.637.500)	2.972.312.906
Total		35.808.522.608	(24.312.780.174)	11.495.742.434

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.12 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp1.237.413.863*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp1.237.413.863 dan Rp931.099.863. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha berupa Software.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020	931.099.863
Mutasi tambah:	
Pembelian	315.664.000
Mutasi Kurang:	
Penghapusan	9.350.000
Saldo per 31 Desember 2020	1.237.413.863
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	878.751.255
Nilai Buku per 31 Desember 2020	358.662.608

Rincian Aset Tak Berwujud, terdiri dari:

1. Mutasi tambah berupa pembelian software berupa sebesar Rp315.664.000.
2. Mutasi kurang berupa penghapusan software Aplikasi Paket Mesin Antrian sebesar Rp9.350.000.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari:

No.	Kode Barang	Tgl. Perolehan	Asal Perolehan	Rupiah Aset
1	Aplikasi AIM	04-11-2010	CV Aidhiya Tama Solusi	12.000.000
2	Aplikasi Data Management System	06-12-2011	PT. Inspira Media Solusi	49.000.000
3	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	35.000.394
4	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	36.346.563
5	CD Data Base Hukum Persaingan	31-12-2011	Hasil Audit SPI	39.279.900
6	Sistem Katalog online	14-05-2012	PT.Prima Dua Jaya	34.237.500
7	Software Manajemen BMN KPPU	13-05-2013	CV. Yonet Nusantara	57.050.000
8	Aplikasi Persidangan	23-12-2014	CV RAUDAH GULISTAN	37.500.000
9	Website KPD	12-06-2014	Tenaga Ahli Website	123.476.600
10	Sisitem Informasi Layanan Umum	31-08-2015	CV Raudah Gulistan	36.850.000
11	Windows server Standart 2012 R2	01-10-2015	PT Rajawali Network	15.695.706
12	Sistem Informasi Monitoring Piutang KPPU	06-11-2015	CV. Raudah Gulistan	14.300.000
13	Windows Server	31-12-2015	PT Mitra Teknologi	13.255.000
14	Aplikasi Kemitraan	17-07-2017	PT Enindo Mitratama	283.990.000
15	Aplikasi Teamviewer	19-07-2017	PT Bhineka	24.961.200
16	Aplikasi Notifikasi Merger	05-12-2017	Consultan	60.000.000
17	Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan	09-10-2019	PT Cahaya Anugerah	48.807.000
18	Software EvIEWS 12 Standart	11-12-2020	PT Panca Putra	37.400.000
19	Software Microsoft Office Std 2019	31-12-2020	PT XL Planet	77.000.000
20	Software Microsoft MAC Std 2019	31-12-2020	PT XL Planet	90.464.000
21	Software Aplikasi Pengelolaan Kerjasama	11-12-2020	Agung Riyadi	44.800.000
22	Software Aplikasi Manajemen Pemeriksaan	28-12-2020	CV Putra	66.000.000
Total				1.237.413.863

C.13 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp55.650.000*

Saldo Aset Lain-Lain per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp55.650.000 dan Rp0.

Aset Lain-Lain merupakan deposit apartemen komisioner TA 2020 yang belum disetorkan ke negara. Deposit apartemen merupakan dana yang tersimpan di pemilik. Dana tersebut dapat digunakan apabila terdapat kekurangan pembayaran layanan daya dan jasa, kerusakan serta kehilangan pada fasilitas apartemen. Sesuai dengan yang diatur dalam SPK Perjanjian Sewa Apartemen, deposit dapat dikembalikan ke Kas Negara maksimal 60 hari kalender. Saat Laporan Keuangan ini disusun, pengembalian deposit apartemen belum dapat dikembalikan karena belum berakhirnya tenggat waktu pengembalian serta pemilik sedang melakukan cek fisik fasilitas

apartemen. Sehingga untuk 4 deposit apartemen terinci dibawah ini tidak dapat dikategorikan sebagai piutang lainnya karena jumlah pengembalian belum dapat dipastikan nilainya.

Rincian Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2020

Keterangan	Nilai
Apartemen Zulfikar Siddik	11.150.000
Apartemen Hj. Evie Rahayu	17.500.000
Apartemen Ratna Intan Mulyati G	14.000.000
Apartemen Fenny Yanti	13.000.000
Jumlah	55.650.000

C.14 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp878.751.255*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp878.751.255 dan Rp732.537.038. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	1.237.413.863	(878.751.255)	358.662.608
Total	237.413.863	(878.751.255)	358.662.608

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp115.812.409*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp115.812.409 dan Rp14.238.864. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	105.312.409	3.738.864	2.716,70
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	10.500.000	10.500.000	0
Total	115.812.409	14.238.864	713,35

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga di KPPU terdiri dari kewajiban Negara dalam mengembalikan kelebihan setoran pembayaran denda persaingan usaha dan denda ikatan dinas.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada lingkup KPPU per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 30/KPPU-L/2010	5.000.000
2	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Persaingan Usaha Nomor Putusan 11/KPPU-L/2014	5.000.000
3	Kelebihan Setoran Pembayaran Denda Ikatan Dinas atas nama Desi Dwi Bastian	500.000
4	BYMHD Tagihan Listrik, Telepon, Air, Internet, dan Pos	105.312.409
Total		115.812.409

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp2.822.968.996

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.822.968.996 dan Rp2.642.968.996. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	2.822.968.996	2.642.968.996	6,81
Total	2.822.968.996	2.642.968.996	6,81

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pembayaran dari Pelaku Usaha atas denda pelanggaran persaingan usaha Tahun 2018, 2017 dan 2016 namun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan rincian sebagai berikut:

Nama	No Putusan	Nilai
PT Citra Mahasurya Industries	07/KPPU-L/2015	1.821.204.996
PT Kentjana Sakti Indonesia	07/KPPU-L/2015	176.764.000
PT Trafoindo Prima Perkasa	07/KPPU-L/2015	825.000.000
Total		2.822.968.996

C.17 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp190.793.773. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	0
Total	0

C.18 Ekuitas

Ekuitas Rp40.187.234.206

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp40.187.234.206 dan Rp54.204.567.687. Ekuitas adalah

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp121.769.374.200

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp121.769.374.200 dan Rp215.734.742.776.

Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 43,56 persen. Hal tersebut disebabkan oleh karena besarnya jumlah putusan inkrah namun tidak disertai pembayaran oleh debitur pada periode ini. Pembayaran tidak dilakukan tepat waktu karena banyaknya debitur yang terkena dampak COVID 19.

Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	4.135.200	4.019.600	2,88
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	630.000	0	100%
Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	121.764.609.000	215.723.695.956	(43,56)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	7.027.220	(100)
Jumlah	121.769.374.200	215.734.742.776	(43,56)

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp40.384.304.250

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp40.384.304.250 dan Rp35.652.500.524.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Kenaikan Beban Pegawai Tahun 2020 sebesar 13,27 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan oleh penyesuaian besaran honorarium pegawai sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor 350/MK.02/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penyesuaian Besaran Honorarium Pegawai Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Uang Honor Tetap	40.384.304.250	35.652.500.524	13,27
Jumlah	40.384.304.250	35.652.500.524	13,27

*Beban Persediaan
Rp2.427.819.895*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.427.819.895 dan Rp2.910.756.801.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 16,59 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Persediaan konsumsi	2.427.654.907	2.910.756.801	(16,59)
Beban Persediaan bahan baku	164.988	-	-
Jumlah	2.427.819.895	2.910.756.801	(16,59)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa
Rp39.058.161.096*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp39.058.161.096 dan Rp38.857.018.538.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,52 persen dibandingkan dengan Tahun 2019. Kenaikan belanja barang dan jasa KPPU dilakukan dalam rangka penanganan pandemic dengan pembelian alat Rapid Test, Hand Sanitizer, Sewa Modem, dan Paket Data. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.228.859.400	1.188.325.761	3,41
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	141.043.540	77.033.560	83,09
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	345.345.695	334.226.235	3,33
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	471.630.000	517.720.000	(8,90)
Beban Barang Operasional Lainnya	295.873.720	277.516.900	6,61

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Barang Operasional Lainnya	295.873.720	277.516.900	6,61
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	784.638.440	0	100%
Beban Bahan	1.935.410.248	2.747.805.457	(29,57)
Beban Honor Output Kegiatan	1.802.598.750	2.484.265.060	(27,44)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.555.631.412	0	100%
Beban Langganan Listrik	1.247.359.001	1.175.266.246	6,13
Beban Langganan Telepon	568.584.338	574.709.103	(1,07)
Beban Langganan Air	22.792.742	76.380.690	(70,16)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37.714.530	75.401.300	(49,98)
Beban Jasa Konsultan	3.149.929.597	4.086.408.762	(22,92)
Beban Sewa	8.449.096.667	8.267.337.770	2,20
Beban Jasa Profesi	2.283.648.000	3.883.096.980	(41,19)
Beban Jasa Lainnya	13.340.151.016	13.080.103.678	1,99
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.397.854.000	0	100%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	11.421.036	(100)
Jumlah	39.058.161.096	38.857.018.538	0,51

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan
Rp3.886.389.146*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.886.389.146 dan Rp3.193.826.268.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 21,68 persen dibandingkan dengan Tahun 2019 disebabkan adanya pemeliharaan gedung Kantor Pusat dan Kantor wilayah II Lampung. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.251.240.336	1.394.357.615	61,45
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	6.477.000	0	100%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.508.101.206	1.639.359.838	(8,01)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	120.570.604	160.108.815	(24,69)
Jumlah	3.886.389.146	3.193.826.268	21,68

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp25.733.807.308*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.733.807.308 dan Rp51.284.419.830

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 49,82 persen disebabkan karena dampak dari COVID-19 sehingga anggaran perjalanan dinas dipotong dan dialihkan kepada penanganan pandemic COVID-19 sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Perjalanan Biasa	15.217.368.675	33.570.917.323	(54,67)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	284.195.000	492.490.000	(42,29)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.132.571.802	3.231.545.962	(34,01)
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1.008.900.000	0	100%

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.084.695.632	10.302.737.961	(31,23)
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	6.076.199	3.686.728.584	(99,84)
Jumlah	25.733.807.308	51.284.419.830	(49,82)

Beban Penyusutan dan Amortisasi **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Rp3.592.117.608

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.592.117.608 dan Rp3.482.093.971.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa Aset Tetap yang menjadi objek penyusutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 dengan menggunakan Metode Garis Lurus.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.431.208.775	3.356.731.425	2,22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.344.616	5.344.616	-
Jumlah Penyusutan	3.436.553.391	3.362.076.041	2,22
Beban Amortisasi Software	155.564.217	120.017.930	29,62
Jumlah Amortisasi	155.564.217	120.017.930	29,62
Jumlah	3.592.117.608	3.482.093.971	3,15

Kenaikan Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 terjadi karena terdapat penambahan pada Peralatan dan Mesin serta Software. Selain itu dapat disampaikan bahwa terdapat pengurangan berupa Reklasifikasi Aset Tak Berwujud ke Aset Lainnya sebesar Rp9.350.000 yang berakibat pada berkurangnya jumlah amortisasi software.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp54.204.567.687

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.204.567.687 dan Rp16.155.332.259.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp93.329.023.989

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp93.329.023.989 dan Rp58.859.607.819. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp79.312.290.508

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79.312.290.508 dan Rp96.908.843.247. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	113.228.643.932
Diterima dari Entitas Lain	(37.728.498.037)
Transfer Keluar	(324.860.937)
Transfer Masuk	175.805.351
Pengesahan Hibah Langsung	3.961.200.199
Jumlah	79.312.290.508

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DKEL sebesar Rp113.228.643.932, sedangkan DDEL sebesar Rp37.728.498.037.

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp324.860.937 terdiri dari:

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Barang Persediaan	Kanwil KPPU	175.713.147
Aset Tetap Renovasi	Kantor Pengelolaan Tik dan BMN Makassar	149.147.790
Jumlah		324.860.937

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp175.805.351 yang terdiri dari:

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Barang Persediaan	Kanwil KPPU	175.805.351
Jumlah		175.805.351

Selisih Transfer Masuk/Transfer Keluar sebesar Rp92.204 terjadi karena pengiriman persediaan ke Kanwil KPPU yang menggunakan Metode Harga Perolehan Terakhir Persediaan.

E.3.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.961.200.199 sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0.

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
Japan International Cooperation Agency (JICA)	langsung bentuk jasa	3.202.812.678
Australia Indonesia Partnership For Economic Development (PROSPERA)	langsung bentuk jasa	758.387.521
Total Pengesahan		3.961.200.199
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		3.961.200.199

E.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir

Rp40.187.234.206

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp40.187.234.206 dan Rp54.204.567.687.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA KPPU

Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tanggal 27 April 2018 perihal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018 menetapkan tentang:

- a. Pemberhentian dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc., dkk. (9 orang);
- b. Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas nama Dr. M. Afif Hasbullah, S.H.,M.Hum., dkk. (9 orang).

Atas dasar tersebut, KPPU menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPPU Nomor 28/KPPU/Kep.1/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode 3 Mei 2018 – 3 November 2020 yaitu Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D sebagai Ketua KPPU serta Ukay Karyadi, S.E., M.E. sebagai Wakil Ketua KPPU dengan anggota sebagai berikut:

1. Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D.;
2. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.;
3. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.;
4. Dinni Melanie, S.H., M.E.;
5. Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.;
6. Harry Agustanto, S.H., M.H.; dan
7. Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

F.2 PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, struktur organisasi KPPU terdiri atas:

1. Anggota Komisi
Komisioner terdiri atas seorang Ketua KPPU merangkap Anggota KPPU, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota KPPU, dan 7 (tujuh) orang Anggota KPPU
2. Sekretariat
 - A. Sekretariat Jenderal, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Hukum
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
 - d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
 - e. Unit Data dan Informasi
 - f. Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan
 - B. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi
 - a. Direktorat Ekonomi
 - b. Direktorat Kebijakan Persaingan
 - c. Direktorat Advokasi Persaingan
 - C. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum

- a. Direktorat Investigasi
 - b. Direktorat Merger dan Akuisisi
 - c. Direktorat Pengawasan Kemitraan
 - d. Direktorat Penindakan
3. Kepaniteraan
 4. Satuan Pengawasan Internal
 5. Kantor Wilayah KPPU (Kanwil KPPU)
 - a. Kantor Wilayah I
 - b. Kantor Wilayah II
 - c. Kantor Wilayah III
 - d. Kantor Wilayah IV
 - e. Kantor Wilayah V
 - f. Kantor Wilayah VI
 6. Dewan Pakar
 7. Kelompok Staff Ahli
 8. Kelompok Kerja
 9. Kelompok Jabatan Fungsional

F.3 KANTOR WILAYAH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam rangka memperluas jangkauan kerja dan mendukung pelaksanaan tugas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki Kantor Perwakilan Daerah (KPD) di 5 (lima) provinsi. Berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15.1/KPPU/Kep.1/V/2019, KPPU mengubah nama KPD menjadi Kantor Wilayah (Kanwil) dan menambah 1 (satu) kantor wilayah lagi, yaitu di Provinsi Bandung, Jawa Barat. Berikut adalah uraiannya:

- a. Kantor Wilayah I Medan
Kanwil Medan bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 148B Sekip, Medan Petisah Kota Medan.
- b. Kantor Wilayah II Lampung
Kanwil Lampung bertempat di Jl. Diponegoro No.40ab, Sumur Batu, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212
- c. Kantor Wilayah III Bandung
Kanwil Bandung bertempat di Jl. PH. H. Mustofa No.22 Kota

- Bandung, Jawa Barat.
- d. Kantor Wilayah IV Surabaya
Kanwil Surabaya bertempat di Gedung Bumi Mandiri, Jalan Basuki Rahmat No. 129-137 Lantai 7, Surabaya.
- e. Kantor Wilayah V di Balikpapan
Kanwil Balikpapan bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan Lt. 3. Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 28, Balikpapan.
- f. Kantor Wilayah VI Makassar
Kanwil Makassar bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lantai 6 Jl. Urip Sumohardjo Km.4 Makassar, Sulawesi Selatan.
- Fungsi Kantor Wilayah KPPU difokuskan pada upaya pencegahan, penerimaan, klarifikasi laporan dan penegakan hukum tingkat pertama, yakni penyelidikan atau investigasi. Dalam fungsi penegakan hukum, Kantor Wilayah turut didukung oleh sumber daya di Kantor Pusat.

F.4 PUTUSAN DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI DAN KASASI YANG PUTUSANNYA DIBACAKAN SEBELUM TANGGAL PELAPORAN KEUANGAN (31 DESEMBER) DAN SALINAN PUTUSANNYA DITERIMA PADA MASA PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH AUDITOR

Dalam masa penyusunan Laporan Keuangan *Audited* ini, terdapat 13 perkara yang telah dibacakan sebelum tanggal pelaporan keuangan (31 Desember) dan salinan putusannya diterima pada masa pemeriksaan lapangan oleh Auditor, KPPU akan mencatat daftar putusan tersebut dalam Daftar Piutang KPPU TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Putusan Tingkat Kasasi			Nilai Denda	Status
	Tahun	Registrasi	Tentang		
1	2012	04/KPPU-L/2012	RS Kendari	7.644.345.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
2	2016	06/KPPU-L/2016	Harlira	8.939.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
3	2016	07/KPPU-L/2016	Kakao	6.598.840.800	Proses Ambil Putusan Kasasi
4	2017	10/KPPU-I/2017	Mandala Krida	7.901.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
5	2018	16/KPPU-I/2018	Tender Bateballa-Jatia CS	1.000.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
6	2018	17/KPPU-I/2018	Tender Bakara-Sabbanyang	1.000.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
7	2018	19/KPPU-I/2018	Kediri	8.400.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
8	2018	20/KPPU-I/2018	Kediri	4.200.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
9	2019	01/KPPU-M/2019	PT Citra Prima Sejati	10.330.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
10	2019	03/KPPU-M/2019	PT Citra Prima Sejati	10.330.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
11	2019	10/KPPU-M/2019	Merger Lumbang Capital	1.200.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
12	2019	11/KPPU-M/2019	Merger Lumbang Capital	1.250.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
13	2019	12/KPPU-M/2019	Merger Lumbang Capital	1.200.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi
Total				69.993.185.800	

Atas daftar putusan tersebut diatas, KPPU belum dapat mengakuinya sebagai Piutang pada Neraca LK KPPU TA 2020 karena menyesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku di KPPU pada Tahun 2020

cukup diungkapkan pada CaLK tahun berkenaan.

Rincian terinci sebagaimana terlampir.

F.5 PUTUSAN KPPU YANG MASIH BERJALAN

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 17 putusan KPPU yang masih berjalan pada proses keberatan di Pengadilan Negeri dan proses Kasasi di Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Terdapat 1 putusan yang dinyatakan bersalah tetapi tidak dikenakan denda;
2. Terdapat 16 Putusan (dari 17 putusan) yang dinyatakan bersalah dan didenda sebesar Rp148.203.685.880;
3. Terdapat 10 putusan yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dengan total denda sebesar Rp66.780.149.880;
4. Terdapat 6 putusan yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dengan total denda Rp 81.423.536.000;
5. Putusan yang telah dikuatkan dan putusan yang dibatalkan Pengadilan Negeri (Total 16 Putusan) masih dalam proses kasasi.

Rincian terinci sebagaimana terlampir.

Jakarta, 04 Mei 2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Ketua KPPU,

DAFTAR DAN LAMPIRAN

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 26-04-2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
ESELON I : 01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 422810 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	419,908,986,146	
0	115212	Piutang Lainnya	52,796,250	
0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	681,519,770	
0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB		391,490,511,146
0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		263,981
0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		528,066,999
0	117111	Barang Konsumsi	589,873,414	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	14,427,115	
0	131111	Tanah	1,987,200,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	32,656,872,202	
0	133111	Gedung dan Bangunan	173,700,000	
0	135111	Aset Tetap Renovasi	1,369,789,158	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,608,161,248	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		24,251,024,211
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		56,118,463
0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		5,637,500
0	162151	Software	1,237,413,863	
0	166111	Aset Lain-lain	55,650,000	
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		878,751,255
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		105,312,409
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		10,500,000
0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka		2,822,968,996
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		113,228,643,932
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	37,728,498,037	
0	313211	Transfer Keluar	324,860,937	
0	313221	Transfer Masuk		175,805,351
0	391111	Ekuitas		54,204,567,687
0	391119	Koreksi Lainnya	600,000	
0	391131	Pengesahan Hibah Langsung		3,961,200,199
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		103,544,998
3	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi		4,135,200

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 26-04-2021
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
ESELON I : 01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 422810 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.		95,000,000
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		630,000
3	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		121,764,609,000
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		94,509,598
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		33,631,355
3	512111	Beban Uang Honor Tetap	40,388,884,600	
3	512111	Pengembalian Beban Uang Honor Tetap		4,580,350
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,228,859,545	
3	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran		145
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	141,043,540	
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	345,345,695	
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	471,630,000	
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	295,873,720	
3	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	784,648,440	
3	521131	Pengembalian Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		10,000
3	521211	Beban Bahan	1,935,410,248	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,808,988,750	
3	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan		6,390,000
3	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,556,721,932	
3	521241	Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		1,090,520
3	522111	Beban Langganan Listrik	1,247,359,001	
3	522112	Beban Langganan Telepon	568,584,338	
3	522113	Beban Langganan Air	22,792,742	
3	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37,714,530	
3	522131	Beban Jasa Konsultan	3,149,929,597	
3	522141	Beban Sewa	8,449,096,667	
3	522151	Beban Jasa Profesi	2,285,833,000	
3	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi		2,185,000
3	522191	Beban Jasa Lainnya	13,340,151,016	
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,397,854,000	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 26-04-2021
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
ESELON I : 01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 422810 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,251,240,336	
3	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	6,477,000	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,508,101,206	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	15,322,870,990	
3	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa		105,502,315
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	284,195,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,136,152,422	
3	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		3,580,620
3	524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1,012,950,000	
3	524115	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		4,050,000
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,095,237,153	
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		10,541,521
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	6,976,199	
3	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		900,000
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,431,208,775	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5,344,616	
3	592115	Beban Amortisasi Software	155,564,217	
3	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,427,654,907	
3	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	120,570,604	
3	593131	Beban Persediaan bahan baku	164,988	
3	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	27,284,312	
3	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPNP	99,920,381,862	
3	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	230,566	
3	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	63,118,307	
3	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	329,729,790	
3	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	1,740,000	
		J U M L A H	713,954,262,751	713,954,262,751

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 26-04-2021
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
ESELON I : 01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 422810 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	115612	Piutang dari KPPN	824,886,068	
0	219711	Utang Kepada KUN	6,081,498,037	
2	425812	Estimasi Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Yang Dialokasikan	31,647,000,000	
2	512111	Allotment Belanja Uang Honor Tetap		40,420,900,000
2	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran		1,330,446,000
2	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		141,060,000
2	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		341,797,000
2	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		471,630,000
2	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya		296,024,000
2	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		818,254,000
2	521211	Allotment Belanja Bahan		1,999,009,000
2	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan		1,834,535,000
2	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		1,574,209,000
2	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		2,910,922,000
2	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik		1,165,188,000
2	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon		563,352,000
2	522113	Allotment Belanja Langganan Air		22,090,000
2	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		37,778,000
2	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan		3,192,843,000
2	522141	Allotment Belanja Sewa		8,578,333,000
2	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi		2,346,512,000
2	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya		9,449,537,000
2	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		1,439,010,000
2	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		2,251,760,000
2	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		6,600,000
2	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1,509,227,000
2	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa		15,386,922,000
2	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		295,036,000
2	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		2,172,323,000
2	524115	Allotment Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		1,017,026,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 26-04-2021
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
ESELON I : 01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 422810 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		7,134,673,000
2	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		6,977,000
2	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4,764,629,000
2	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya		574,928,000
3	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		103,544,998
3	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi		4,135,200
3	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.		149,096,682
3	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		630,000
3	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		37,369,898,638
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		101,192,519
3	512111	Belanja Uang Honor Tetap	40,389,469,600	
3	512111	Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap		4,580,350
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,228,859,545	
3	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran		145
3	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	141,043,540	
3	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	339,452,255	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	471,630,000	
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	295,873,720	
3	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	784,648,440	
3	521131	Pengembalian Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		10,000
3	521211	Belanja Bahan	1,935,410,248	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,814,450,000	
3	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan		6,390,000
3	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,556,721,932	
3	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		1,090,520
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,906,086,385	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	1,164,803,555	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	556,689,320	
3	522113	Belanja Langganan Air	21,969,572	
3	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	37,714,530	

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)**

Kode Laporan: NPSAIKT
Tanggal : 26-04-2021
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
ESELON I : 01 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 422810 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	522131	Belanja Jasa Konsultan	3,149,929,597	
3	522141	Belanja Sewa	8,551,690,196	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	2,285,833,000	
3	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi		2,185,000
3	522191	Belanja Jasa Lainnya	9,378,950,817	
3	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,397,854,000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,251,240,336	
3	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	6,477,000	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,508,101,206	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	15,322,870,990	
3	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa		105,502,315
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	284,195,000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,136,152,422	
3	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		3,580,620
3	524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	1,012,950,000	
3	524115	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		4,050,000
3	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,095,237,153	
3	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		10,541,521
3	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	6,976,199	
3	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri		900,000
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,761,547,295	
3	536111	Belanja Modal Lainnya	572,646,550	
		J U M L A H	151,920,858,508	151,920,858,508

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode Lap : LO.KL

Tanggal : 05/05/21 12:42

Halaman : 1

Prg ID : lap_lo_kl --

Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	121,769,374,200	215,734,742,776	(93,965,368,576)	(43.556)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	121,769,374,200	215,734,742,776	(93,965,368,576)	(43.556)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	121,769,374,200	215,734,742,776	(93,965,368,576)	(43.556)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	40,384,304,250	35,652,500,524	4,731,803,726	13.272
Beban Persediaan	2,427,819,895	2,910,756,801	(482,936,906)	(16.591)
Beban Barang dan Jasa	39,058,161,096	38,857,018,538	201,142,558	0.518
Beban Pemeliharaan	3,886,389,146	3,193,826,268	692,562,878	21.684
Beban Perjalanan Dinas	25,733,807,308	51,284,419,830	(25,550,612,522)	(49.821)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 05/05/21 12:42
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,592,117,608	3,482,093,971	110,023,637	3.16
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	99,983,730,735	139,403,515,234	(39,419,784,499)	(28.277)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	215,066,330,038	274,784,131,166	(59,717,801,128)	(21.733)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(93,296,955,838)	(59,049,388,390)	(34,247,567,448)	57.998
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(226,184,792)	104,422,757	(330,607,549)	(316.605)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	103,544,998	311,229,999	(207,685,001)	(66.73)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	329,729,790	206,807,242	122,922,548	59.438
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	194,116,641	85,357,814	108,758,827	127.415
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	223,140,953	113,420,452	109,720,501	96.738
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	29,024,312	28,062,638	961,674	3.427
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(32,068,151)	189,780,571	(221,848,722)	(116.897)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(93,329,023,989)	(58,859,607,819)	(34,469,416,170)	58.562
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(93,329,023,989)	(58,859,607,819)	(34,469,416,170)	58.562

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 108

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 05/05/21 1:29 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	54,204,567,687	16,155,332,259	38,049,235,428	235.521
SURPLUS/DEFISIT-LO	(93,329,023,989)	(58,859,607,819)	(34,469,416,170)	58.562
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(600,000)	0	(600,000)	()
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	
LAIN-LAIN	(600,000)	0	(600,000)	()
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	79,312,290,508	96,908,843,247	(17,596,552,739)	(18.158)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(14,017,333,481)	38,049,235,428	(52,066,568,909)	(136.84)
EKUITAS AKHIR	40,187,234,206	54,204,567,687	(14,017,333,481)	(25.86)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 108

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tgl. Cetak 05/05/2021 12:42 PM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	190,793,773	(190,793,773)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	419,961,782,396	335,340,958,705	84,620,823,691	25.23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(391,490,775,127)	(291,570,162,699)	(99,920,612,428)	34.27
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	28,471,007,269	43,770,796,006	(15,299,788,737)	(34.95)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	681,519,770	735,616,452	(54,096,682)	(7.35)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(528,066,999)	(464,948,692)	(63,118,307)	13.58
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	153,452,771	270,667,760	(117,214,989)	(43.31)
Persediaan	604,300,529	241,905,396	362,395,133	149.81
JUMLAH ASET LANCAR	29,228,760,569	44,474,162,935	(15,245,402,366)	(34.28)
ASET TETAP				
Tanah	1,987,200,000	1,987,200,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	32,656,872,202	28,793,016,373	3,863,855,829	13.42
Gedung dan Bangunan	173,700,000	173,700,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	2,977,950,406	3,171,148,246	(193,197,840)	(6.09)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(24,312,780,174)	(21,745,221,059)	(2,567,559,115)	11.81
JUMLAH ASET TETAP	13,482,942,434	12,379,843,560	1,103,098,874	8.91
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,237,413,863	931,099,863	306,314,000	32.90
Aset Lain-lain	55,650,000	0	55,650,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(878,751,255)	(732,537,038)	(146,214,217)	19.96
JUMLAH ASET LAINNYA	414,312,608	198,562,825	215,749,783	108.66
JUMLAH ASET	43,126,015,611	57,052,569,320	(13,926,553,709)	(24.41)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	115,812,409	14,238,864	101,573,545	713.35
Pendapatan Diterima Dimuka	2,822,968,996	2,642,968,996	180,000,000	6.81
Uang Muka dari KPPN	0	190,793,773	(190,793,773)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,938,781,405	2,848,001,633	90,779,772	3.19
JUMLAH KEWAJIBAN	2,938,781,405	2,848,001,633	90,779,772	3.19
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	40,187,234,206	54,204,567,687	(14,017,333,481)	(25.86)
JUMLAH EKUITAS	40,187,234,206	54,204,567,687	(14,017,333,481)	(25.86)
JUMLAH EKUITAS	40,187,234,206	54,204,567,687	(14,017,333,481)	(25.86)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43,126,015,611	57,052,569,320	(13,926,553,709)	(24.41)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 05/05/21 1:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	31,647,000,000	37,728,498,037	(6,081,498,037)	119	20,100,000,000	39,090,354,630	(18,990,354,630)	194
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	31,647,000,000	37,728,498,037	(6,081,498,037)	119	20,100,000,000	39,090,354,630	(18,990,354,630)	194
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	40,420,900,000	40,384,889,250	36,010,750	100	36,168,231,000	35,652,500,524	515,730,476	99
	BELANJA BARANG	68,293,073,000	67,509,560,837	783,512,163	99	96,234,141,000	94,948,109,520	1,286,031,480	99
	BELANJA MODAL	5,339,557,000	5,334,193,845	5,363,155	100	4,228,658,000	4,210,258,447	18,399,553	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	114,053,530,000	113,228,643,932	824,886,068	99	136,631,030,000	134,810,868,491	1,820,161,509	99
C	PEMBIAYAAN				0				0

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JP 202012010
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Deposit Apartemen yg belum dikembalikan
 karena belum ada keputusan adanya kerusakan yang ditanggung
 oleh KPPU

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	56.250.000	
	K	522141	Belanja Sewa		56.250.000

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I



Nama	Nilai
Apartemen Zulfikar Siddik	11.750.000
Apartemen Hj. Evie Rahayu	17.500.000
Apartemen Ratna Intan Mulyati G	14.000.000
Apartemen Fenny Yanti	13.000.000
	56.250.000

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JP 202012011
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Akrual Air Des 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Beban Langganan Air	903.173	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		903.173

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I



Rekap Tagihan Daya dan Jasa Bulan Desember 2020 yang di bayarkan pada Januari 2021

Akun	Uraian	Pusat	Bandung	Medan	Lampung	Surabaya	Balikpapan	Makassar	Total
522111	Listrik	76.040.918	-	6.781.309			237.948	-	83.060.175
522112	Telepon	-	-	1.622.968	2.483.128		1.415.205	9.527.849	15.049.150
522113	Air	-	-	771.740			131.433	-	903.173
522141	Belanja Sewa			-	406.471			-	406.471
521114	Pos/ Pengiriman	-	-	1.350.310		80.000	4.463.130	-	5.893.440
	Total	76.040.918	-	10.526.327	2.889.599	80.000	6.247.716	9.527.849	105.312.409

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP 202012012
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Akrual Telepon Des 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langgananan Telepon	15.049.150	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		15.049.150

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP 202012013
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Akrual Listrik Des 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	83.060.175	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		83.060.175

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP 202012014
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Akrual Air Sewa Rumah Dinas

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522141	Beban Sewa	406.471	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		406.471

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JP 202012015
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Akrual Pos dan Pengiriman Des 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi
- Akrual

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.893.440	
	K	212112	Belanja Barang YMHD		5.893.440

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JP 2020120016
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Penyisihan Piutang DPU sampai dengan 31 Desember 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penambahan Piutang TGR
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi Beban-Aset

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	11.557.694.136	
	K	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB		11.557.694.136

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I





**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JP 2020120017
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Penyisihan Piutang Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penambahan Piutang TGR
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi Beban-Aset

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	230.566	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		230.566

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I





**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 202012001
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Penambahan Denda Ikadin periode 1 Okt - 31 Des 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Piutang TGR
 Penyisihan Piutang TGR

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	50.000.000	
	K	425791	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara		50.000.000

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Penambahan Piutang TGR dan Denda Ikatan Dinas
selama periode 01 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020**

Nama	No Surat	Tgl Pengunduran Diri/Tgl Surat	Tgl Jt Tempo	Jumlah	Tgl Catat
Rheza Mario	97/SJ/Kep/II/2020	20-01-2020	19-02-2020	20.000.000	Resign Pegawai Angkatan 2016
Rima Yulia	20/KPPU/Ke p.1/VI/2020	8 Juni 2020	8 Juni 2020	25.000.000	Resign Pegawai Angkatan 2019
Shaula Rizky Sarlita S.E.	71.64/SJ/SP K/XI/2019	16-11-2020	16-12-2020	25.000.000	Resign Pegawai Angkatan 2019
Rizky Kurniyanto Widyasmito S.H.	71.59/SJ/SP K/XI/2019	30-11-2020	30-12-2020	25.000.000	Resign Pegawai Angkatan 2019
				95.000.000	

Total Triwulan IV TA 2020

50.000.000

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 202012002
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Reklasifikasi Pembayaran TGR Katagori Jangka Panjang ke
Jangka Pendek Per 31 Desember 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	631.519.770	
	K	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		631.519.770

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 201912003
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Reklas Penyisihan Piutang TGR Piutang TGR
Jangka Panjang kepada TGR Bag lancar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	538.482.450	
	K	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		538.482.450

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 202012014
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Pengembalian Belanja TA 2020 yang disetorkan pada TA 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Piutang Lainnya
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	5.461.250	
	K	521213	Beban Honor Output Kegiatan		5.461.250

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 202012015
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Penambahan Putusan Denda Persaingan Usaha yang Inkracht selama periode 1 Oktober 2020 s.d. 31 Desember 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
 Penyisihan Piutang TGR
 Persediaan
 Koreksi Antar Beban
 Reklasifikasi Neraca
 Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	41.872.950.000	
	K	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		41.872.950.000

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Penambahan Putusan Denda Persaingan Usaha yang Inkracht
selama periode 01 Januari 2020 - 30 Juni 2020**

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	04/KPPU-I/2016	20-02-2017	14-01-2020	25.000.000.000
PT. Astra Honda Motor	04/KPPU-I/2016	20-02-2017	14-01-2020	22.500.000.000
PT PLN Batubara	23/KPPU-M/2019	07-04-2020	28-04-2020	1.000.000.000
PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	06/KPPU-M/2017	06-09-2018	25-02-2020	2.000.000.000
PT Matahari Pontianak Indah Mall	27/KPPU-M/2019	07-04-2020	28-04-2020	1.025.000.000
PT Matahari Pontianak Indah Mall	07/KPPU-I/2019	08-10-2019	02-03-2020	12.600.000.000
PT Karya Mandiri Jaya Pratama	14/KPPU-L/2016	13-09-2017	26-02-2020	1.842.659.000
PT Nokilalaki Sembada	14/KPPU-L/2016	13-09-2017	26-02-2020	1.000.000.000
PT Cahya Mentari Cemerlang	14/KPPU-L/2016	13-09-2017	26-02-2020	1.000.000.000
PT Hanro	19/KPPU-I/2016	05-12-2017	27-02-2020	500.000.000
PT Karya Dharma Jambi Persada	19/KPPU-I/2016	05-12-2017	27-02-2020	250.000.000
PT Bina Uli	19/KPPU-I/2016	05-12-2017	27-02-2020	250.000.000
PT FKS Multi Agro	19/KPPU-M/2019	03-02-2020	17-03-2020	1.000.000.000
PT Dharmasatya Nusantara, Tbk	29/KPPU-M/2019	20-02-2020	12-03-2020	1.250.000.000
PT FKS Multi Agro TBK	20/KPPU-M/2019	12 Februari 2020		1.438.000.000
PT Merdeka Copper Gold, Tbk	17/KPPU-M/2019	19 Februari 2020		1.000.000.000
				73.655.659.000

**Penambahan Putusan Denda Persaingan Usaha yang Inkracht
selama periode 01 Juli - 30 Sep 2020**

PT Darma Henwa, Tbk	09/KPPU-M/2017	06-09-2018	10-03-2020	3.750.000.000
PC Muriah Ltd.	04/KPPU-L/2017	19-09-2018	27-08-2020	1.243.000.000
PC Ketapang II Ltd.	04/KPPU-L/2017	19-09-2018	27-08-2020	1.243.000.000
				6.236.000.000
				79.891.659.000

**Penambahan Putusan Denda Persaingan Usaha yang Inkracht
selama periode 1 Okt - 31 Des 2020**

PT Audison Nusantara	03/KPPU-L/2019	25-08-2009	07-11-2020	50.000.000
PT Kediri Putra	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	2.000.000.000
PT Ayam Mulya Abadi	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	1.000.000.000
PT Ayam Mulya Aspalmix	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	1.000.000.000
PT Ratna	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	1.000.000.000
PT Tirta Investama	22/KPPU-I/2016	19-12-2017	09-09-2020	13.845.450.000
PT Balina Agung Perkasa	22/KPPU-I/2016	19-12-2017	09-09-2020	6.294.000.000
PT Berkat Yakin Gemilang	21/KPPU-I/2016	21-02-2018	01-09-2020	2.062.800.000
PT Surya Gemilang Indah	21/KPPU-I/2016	21-02-2018	01-09-2020	515.700.000
PT Duta Utama Sumatera	18/KPPU-L/2015	07-11-2016	08-10-2020	2.133.000.000
PT Raja Oloan	18/KPPU-L/2015	07-11-2016	08-10-2020	511.000.000
PT Multi Raya Arttech	18/KPPU-L/2015	07-11-2016	08-10-2020	761.000.000
PT Kediri Putra	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	3.500.000.000
PT Triple S Indosedulur	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	3.500.000.000
PT Ayam Mulya Indah	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	1.250.000.000
PT Ratna	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	1.250.000.000
PT Jatisono Multi Konstruksi	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	1.200.000.000
				41.872.950.000
				121.764.609.000

-

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JU 202012016
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
 Periode Tgl 1 Okt s.d. 31 Des 2020

Sem I 21.577.053.185
 TW III 9.880.461.174

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	5.732.384.279	
	K	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak		5.732.384.279

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I





**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 202012017
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Pengakuan pembayaran piutang selama 1okt - 31des 20
tetapi putusannya belum inkraacht

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkraacht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	45.000.000	
	K	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka		45.000.000

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Pengakuan pembayaran piutang selama 1okt - 31des 20
tetapi putusannya belum inkraht**

Nama	Tanggal Bayar	NTPN	Nilai
PT TRAFIINDO PRIMA PERKASA	9/10/2020	8E9E42G4UKRHUPIQ	15.000.000
PT TRAFIINDO PRIMA PERKASA	13-11-2020	DFDD561QTV86NM8I	15.000.000
PT TRAFIINDO PRIMA PERKASA	10/12/2020	FE6BD7QLTKFQ9834	15.000.000
			45.000.000

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 202012018
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Biaya Deposit Apartemen Komisi TA 2020 yang telah disetorkan di TA 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Piutang Lainnya
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	46.750.000	
	K	522141	Belanja Sewa		46.750.000

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Biaya Deposit Apartemen Komisi TA 2020 yang telah
disetorkan di TA 2021**

Nama	Tanggal Bayar	NTPN	Ket	Nilai
uang deposit pemilik rumah Tia Medira	5/2/2021	0A7A10N9V88TK7GU	Apartemen Pak Hari	10.000.000
deposit pemilik rumah Leonardus Andy H	5/2/2021	365063CIE002R9E9	Apartemen Chandra	18.000.000
Pengembalian Deposit dari Kasriel Ruslim	9/2/2021	5523B8N3DNED6L9B	Apartemen Pak Afif	13.750.000
Pengembalian deposit dari Ririn Putri Anriani	9/2/2021	ED2673CIE007T15F	Apartemen Pak Guntur	5.000.000
				46.750.000

**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL UMUM)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Eselon I : Sekretariat Jenderal
Wilayah : DKI Jakarta
Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. Dokumen : JU 202012019
Tanggal : 31 Desember 2020
Tahun Anggaran : 2020
Keterangan : Pengembalian Gaji 13 Pegawai TA 2020 an Nurzanah

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Penyisihan Piutang TGR
- Piutang Lainnya
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	585.000	
	K	512111	Belanja Uang Honor Tetap		585.000

Tanggal: 31 Desember 2020
Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JU 202012020
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR sampai dengan 31 Des 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Lainnya
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penambahan Piutang TGR
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi Beban-Aset

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	10.415.451	
	K	594931	Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		10.415.451

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I

Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda

Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I





**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JU 202012020
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Reklas Beban Penyisihan Piutang TGR sampai dengan 31 Des 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Lainnya
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penambahan Piutang TGR
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi Beban-Aset

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	73.533.758	
	K	594931	Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		73.533.758

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JU 202012022
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Penyesuaian atas Penyisihan Piutang Denda Persaingan Usaha
 (Audited)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Lainnya
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penambahan Piutang TGR
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi Beban-Aset

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	1.362.000.000	
	K	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB		1.362.000.000

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JU 202012023
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Reklasifikasi atas saldo belanja dibayar dimuka menjadi aset lain-lain
 (Audited)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Lainnya
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penambahan Piutang TGR
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi Beban-Aset

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	166111	Aset Lain - Lain	56.250.000	
	K	114112	Belanja Barang yang dibayar dimuka (prepaid)		56.250.000

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I



**Formulir MEMO PENYESUAIAN
(JURNAL PENYESUAIAN)**

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Eselon I : Sekretariat Jenderal
 Wilayah : DKI Jakarta
 Satuan Kerja : Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 No. Dokumen : JU 202012024
 Tanggal : 31 Desember 2020
 Tahun Anggaran : 2020
 Keterangan : Penyesuaian atas kelebihan pencatatan saldo belanja dibayar
 dimuka per 31 Desember sebesar Rp600.000
 (Audited)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- Penyisihan Piutang Lainnya
- Pembayaran Piutang Denda Persaingan Usaha
- Piutang Inkracht Denda Persaingan Usaha
- Pembayaran Piutang Denda Ikatan Dinas
- Penambahan Piutang TGR
- Penyisihan Piutang TGR
- Persediaan
- Koreksi Antar Beban
- Reklasifikasi Neraca
- Koreksi Beban-Aset

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	600.000	
	K	166111	Aset Lain - Lain		600.000

Tanggal: 31 Desember 2020
 Dibuat Oleh: Irene Erika I



Tanggal: 31 Desember 2020
 Disetujui Oleh: Gusbella Manda



Tanggal: 31 Desember 2020
 Direkam oleh: Irene Erika I



**Rincian Output Strategis KPPU
TA 2020**

No.	Nama Output	Satuan	Pagu	Realisasi	Realisasi	Total TVK	Total RVK	Persen RVK
			(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Volume)	(Volume)	(%)
1.	3950.954 Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	5.156.157.000	5.150.627.773	99,89	1,00	1,00	100
2.	3950.956 Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	Layanan	411.028.000	408.606.409	99,41	1,00	1,00	100
3.	3950.959 Layanan Protokoler	Layanan	648.737.000	648.336.844	99,94	1,00	1,00	100
4.	3950.962 Layanan Umum	Layanan	5.263.671.000	5.262.043.907	99,97	1,00	1,00	100
5.	3950.963 Layanan Data dan Informasi	Layanan	364.753.000	361.045.606	98,98	1,00	1,00	100
6.	3950.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	1.556.584.000	1.542.784.092	99,11	1,00	1,00	100
7.	3950.994 Layanan Perkantoran	Layanan	61.683.417.000	61.504.878.025	99,71	1,00	1,00	100
8.	3951.051 Pelaksanaan Eksekusi Putusan KPPU	Milyar Rupiah	335.529.000	333.976.700	99,54	31,65	35,10	110,9
9.	3951.957 Layanan Hukum	Layanan	228.479.000	224.675.611	98,34	1,00	1,00	100
10.	3951.969 Layanan Bantuan Hukum	Layanan	343.948.000	339.965.350	98,84	1,00	1,00	100
11.	3952.068 Pengawasan Persaingan Usaha	Kajian	2.414.670.000	2.406.736.102	99,67	5,00	6,00	120,02
12.	3952.078 Pengelolaan dan Pengembangan Basis Data	Kajian	485.643.000	452.022.492	93,08	1,00	1,00	100,11
13.	3953.073 Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan	Dugaan Pelanggaran	1.999.952.000	1.987.802.738	99,39	11,00	11,00	100
14.	3953.074 Monitoring Pelaksanaan Surat Peringatan	Laporan Monitoring	370.792.000	369.298.442	99,6	1,00	1,00	100
15.	3954.965 Layanan Audit Internal	Layanan	591.033.000	563.355.913	95,32	1,00	1,00	100
16.	3955.074 Pengawasan Persaingan Usaha di Daerah	Pengawasan	699.084.000	693.857.840	99,25	6,00	7,00	116,67
17.	3955.075 Rekomendasi Perkara Persaingan Daerah	Perkara	1.157.348.000	1.148.596.165	99,24	24,00	24,01	100,04
18.	3955.076 Harmonisasi Kebijakan Persaingan Daerah	Kebijakan Daerah	1.096.708.000	1.084.599.059	98,9	6,00	6,00	100
19.	3955.077 Penguatan Kelembagaan di Daerah	Dokumen	2.419.979.000	2.392.712.364	98,87	48,00	48,00	100
20.	3956.075 Investigasi Pelanggaran Persaingan Usaha	Dugaan Pelanggaran	4.234.268.000	4.206.164.492	99,34	62,00	66,00	106,45
21.	3957.077 Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha	Perkara	3.277.035.000	3.245.272.111	99,03	20,00	24,00	120
22.	3958.073 Penilaian Merger dan Akuisisi	Penilaian	1.996.786.000	1.931.987.374	96,75	21,00	25,00	119,05
23.	3958.074 Penanganan Perkara Merger dan Akuisisi	Perkara	263.480.000	252.415.350	95,8	3,00	3,00	100,03
24.	3959.952 Layanan Perencanaan	Layanan	493.327.000	486.291.628	98,57	1,00	1,00	100
25.	3959.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	160.434.000	158.752.440	98,95	1,00	1,00	100
26.	3959.955 Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	720.998.000	718.406.149	99,64	1,00	1,00	100
27.	5159.052 Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Internasional	Kegiatan	295.933.000	288.069.064	97,34	3,00	3,00	100
28.	5159.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1.619.835.000	1.580.299.463	97,56	1,00	1,00	100
29.	5159.960 Layanan Manajemen Organisasi	Layanan	1.120.902.000	1.110.044.815	99,03	1,00	1,00	100
30.	5162.074 Evaluasi Kebijakan Pemerintah	Kajian	1.817.027.000	1.775.771.294	97,73	4,00	5,00	125,02
31.	5162.075 Penyusunan dan Monitoring Surat Saran	Surat Saran	149.905.000	147.163.955	98,17	6,00	7,04	117,34
32.	5194.071 Advokasi Persaingan Usaha	Advokasi	1.358.486.000	1.351.372.827	99,48	9,00	12,00	133,34
33.	5194.072 Advokasi Kemitraan	Advokasi	676.241.000	650.497.928	96,19	7,00	8,00	114,29
34.	5194.073 Pengelolaan Modul Advokasi	Modul	204.715.000	193.610.067	94,58	3,00	3,00	100,03
35.	5275.076 Penanganan Perkara Persaingan Usaha	Perkara	8.436.646.000	8.256.603.543	97,87	34,00	34,00	97,06
Total			114.053.530.000	113.228.643.932	99,28	320,65	344,15	107,33



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-775/PB/2020 12 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Denda
Persaingan Usaha di KPPU

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-100/S/SJ/IX/2020 tanggal 7 September 2020 hal Permohonan Koreksi Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Denda Persaingan Usaha, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat dimaksud Saudara menyampaikan bahwa salah satu temuan BPK pada LHP atas LK KPPU Tahun 2019 menyebutkan bahwa kebijakan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada KPPU belum sepenuhnya memperhatikan *nature* dan kondisi piutang denda persaingan usaha, dan BPK merekomendasikan KPPU agar menyusun juknis tersendiri dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyempurnaan perangkat pengaturan yang dapat mendukung perbaikan pengelolaan penyisihan piutang tidak tertagih-piutang bukan pajak atas denda persaingan usaha.
2. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dunia yang mengalami perlambatan dan perlunya diberikan kebijakan relaksasi bagi pelaku usaha terlapor dalam pembayaran piutang denda persaingan usaha, Saudara memandang bahwa jangka waktu untuk menetapkan piutang denda persaingan usaha untuk dikategorikan sebagai piutang macet terlalu singkat/prematur, sedangkan KPPU masih dapat dan perlu melakukan tindakan-tindakan untuk mendorong pelaku usaha terlapor melaksanakan putusan KPPU secara sukarela.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Saudara meminta tanggapan terkait usulan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih atas denda persaingan usaha yang selanjutnya akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi KPPU.
4. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan bersama antara Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dan KPPU, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, penentuan kualitas piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - 2) kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

- 3) kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - 4) kualitas macet apabila:
 - a) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - b) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- b. Pada konsep perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang denda persaingan usaha yang Saudara usulkan, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan mendasar dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 pada jangka waktu penentuan piutang dengan kualitas lancar, kurang lancar, dan diragukan. Namun, terdapat perbedaan ketentuan jangka waktu dan kondisi untuk menetapkan kualitas piutang menjadi macet, yaitu memperpanjang jangka waktu hingga 250 (dua ratus lima puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang ketiga (yang dapat dipersamakan dengan Surat Tagihan Ketiga), dan telah mencakup berbagai kegiatan proses eksekusi yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha terlapor melaksanakan putusan KPPU secara sukarela.
- c. Dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan rekomendasi BPK, maka atas piutang denda persaingan usaha di KPPU yang merupakan jenis piutang bukan pajak yang timbul dari putusan pengadilan, karena sifatnya yang berbeda dengan pendapatan bukan pajak lainnya, maka perhitungan penyisihan piutang tersebut dan penentuan kualitas piutangnya dapat dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan tersendiri oleh KPPU.
- d. Atas konsep perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih pada piutang denda persaingan usaha sebagaimana Saudara usulkan, terlampir kami sampaikan masukan terhadap konsep dimaksud untuk dapat dijadikan pertimbangan dan menjadi bagian dari pengaturan dalam Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi di lingkup KPPU.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto



Matriks Masukan atas Konsep Penentuan Kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Denda Persaingan Usaha di KPPU

Kualitas Piutang	Penyisihan	Usulan KPPU	Masukan/Tanggapan DJPb
Lancar	0,50%	Dilakukan pelunasan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Putusan KPPU/Putusan Keberatan (Putusan PN)/Putusan Kasasi (Putusan Mahkamah Agung) berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>).	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo. Keterangan: Penjelasan tentang jatuh tempo, baik jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan titik jatuh temponya akan dijelaskan lebih lanjut oleh KPPU dalam petunjuk teknis/proses bisnis.
Kurang Lancar	10%	30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan putusan yang pertama (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).	90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang pertama (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).
Diragukan	50%	30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan putusan yang kedua (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang kedua (sejak surat diterima oleh pelaku usaha).
Macet	100%	250 (dua ratus lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang ketiga yang telah mencakup kegiatan proses eksekusi di bawah ini, antara lain namun tidak terbatas pada: a. identifikasi dan validasi pelaku usaha; b. komunikasi langsung dengan pelaku usaha; c. pendaftaran putusan KPPU ke Pengadilan Negeri (PN);	120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pelaksanaan putusan yang ketiga (sejak surat diterima oleh pelaku usaha). Keterangan: Proses untuk pelaksanaan putusan tidak terkait dengan usaha kegiatan proses eksekusi, sehingga tidak perlu dicantumkan pada penentuan kualitas piutang.

		<ul style="list-style-type: none">d. permohonan eksekusi yang mencakup permohonan teguran (<i>aanmaning</i>) I dan II;e. penetapan teguran (<i>aanmaning</i>) oleh PN;f. permohonan penetapan eksekusi ke PN;g. permohonan sita eksekusi ke PN;h. penelusuran aset tidak bergerak milik pelaku usaha ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) untuk upaya pelaksanaan eksekusi putusan KPPU;i. penelusuran rekening pelaku usaha ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);j. penelusuran aset bergerak milik pelaku usaha ke Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);k. pengumuman di media massa (elektronik dan/atau cetak);l. permintaan bantuan kepada pihak ketiga.	
--	--	--	--

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet
Kode Perkiraan: 115211 (Piutang Penerimaan Negara Bukan pajak)														
1	Konsorsium PT Lina Permai Sakti	08/KPPU-L/2004	19-05-2008	19-05-2008	719.744.600	-	-	719.744.600						719.744.600
2	PT Spektra Tata Utama	20/KPPU-L/2005	19-12-2008	12-08-2009	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000						1.000.000.000
3	PT Dinamika Prakarsa Elektrikal	20/KPPU-L/2005	19-12-2008	12-08-2009	840.000.000	-	-	840.000.000						840.000.000
4	CV Risa	02/KPPU-L/2007	19-07-2007	10-08-2007	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000						1.000.000.000
5	PT Anugerah Multi Perkasatama	06/KPPU-L/2007	18-09-2007	13-12-2007	95.000.000	-	-	95.000.000						95.000.000
6	EMI Music South East Asia	19/KPPU-L/2007	04-11-2010	04-11-2010	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000						1.000.000.000
7	PT Alfatama Anugerah Sari Albaqi	21/KPPU-L/2007	23-01-2009	22-07-2009	505.000.000	-	-	505.000.000						505.000.000
8	PT Putera Nusa Perkasa	06/KPPU-L/2008	09-12-2008	31-12-2008	31.500.000	-	-	31.500.000						31.500.000
9	PT Uskarindo Prima	09/KPPU-L/2008	22-08-2011	22-08-2011	355.000.000	-	-	355.000.000						355.000.000
10	PT Karya Bukit Nusantara	12/KPPU-L/2008	11-08-2008	10-02-2012	10.000.000	-	-	10.000.000	PN	26/K/KPN/VI/2015	23-06-2015			10.000.000
11	PT Dipa Panalasa	12/KPPU-L/2008	11-08-2008	10-02-2012	10.000.000	-	-	10.000.000	PN	26/K/KPN/VI/2015	23-06-2015			10.000.000
12	CV Kartika Indah Jaya	12/KPPU-L/2008	11-08-2008	10-02-2012	100.000.000	-	-	100.000.000	PN	26/K/KPN/VI/2015	23-06-2015			100.000.000
13	CV Toruan Nciho Corporation	12/KPPU-L/2008	11-08-2008	10-02-2012	6.000.000	-	-	6.000.000	PN	26/K/KPN/VI/2015	23-06-2015			6.000.000
14	PT Care Indonusa	13/KPPU-L/2008	15-10-2008	26-10-2008	100.000.000	-	-	100.000.000						100.000.000
15	Ferry Marpaung	13/KPPU-L/2008	15-10-2008	26-10-2008	250.000.000	-	-	250.000.000						250.000.000
16	PT Alya Ardin Mandiri	19/KPPU-L/2008	08-09-2008	08-10-2008	350.000.000	-	-	350.000.000						350.000.000
17	PT Cipta Barabata	19/KPPU-L/2008	08-09-2008	08-10-2008	50.000.000	-	-	50.000.000						50.000.000
18	PT Aswindo Putra Mandiri	19/KPPU-L/2008	08-09-2008	08-10-2008	100.000.000	-	-	100.000.000						100.000.000
19	FA Matano Trading Coy	19/KPPU-L/2008	08-09-2008	08-10-2008	100.000.000	-	-	100.000.000						100.000.000
20	Panitia Tender Pekerjaan Perbaikan dan Pengembangan Pipa Distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru Tahun Anggaran 2007 PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru / PT Karsa Tirta Dharma Pangada	23/KPPU-L/2008	12-02-2010	13-12-2012	221.183.000	-	-	221.183.000						221.183.000
21	PT Sarana Indah Perkasa Abadi	23/KPPU-L/2008	12-02-2010	13-12-2012	112.221.000	-	-	112.221.000						112.221.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet
51	PT Merangin Karya Sejati	11/KPPU-L/2010	19-03-2012	03-04-2013	480.000.000	-	-	480.000.000						480.000.000
52	PT. Bungo Pantai Bersaudara	14/KPPU-L/2010	19-03-2012	03-04-2013	70.000.000	-	-	70.000.000						70.000.000
53	PT. Kreasindo Kenari Mulya	14/KPPU-L/2010	19-03-2012	03-04-2013	100.000.000	-	-	100.000.000						100.000.000
54	PT. Dwi Karsa Rizki	14/KPPU-L/2010	19-03-2012	03-04-2013	100.000.000	-	-	100.000.000						100.000.000
55	PT Putra Hadi	18/KPPU-L/2010	22-09-2010	05-10-2010	80.000.000	-	-	80.000.000						80.000.000
56	Ibrahim	18/KPPU-L/2010	22-09-2010	05-10-2010	150.000.000	-	-	150.000.000						150.000.000
57	PT Sarana Asean	19/KPPU-L/2010	24-05-2011	13-10-2011	50.000.000	-	-	50.000.000						50.000.000
58	PT Lingkar Nusa Raya	19/KPPU-L/2010	24-05-2011	13-10-2011	100.000.000	-	-	100.000.000						100.000.000
59	PT Melayu Riau Persada	19/KPPU-L/2010	24-05-2011	13-10-2011	300.000.000	-	-	300.000.000						300.000.000
60	PT Neka Rita	19/KPPU-L/2010	24-05-2011	13-10-2011	75.000.000	-	-	75.000.000						75.000.000
61	PT Indra Sejati	19/KPPU-L/2010	24-05-2011	13-10-2011	100.000.000	-	-	100.000.000						100.000.000
62	PT Superita Indo perkasa	19/KPPU-L/2010	24-05-2011	13-10-2011	150.000.000	-	-	150.000.000						150.000.000
63	Kepala Dinas Bina Marga Bengkalis	19/KPPU-L/2010	24-05-2011	13-10-2011	250.000.000	-	-	250.000.000						250.000.000
64	CV Yogi Pratama	20/KPPU-L/2010	06-10-2010	06-02-2011	179.216.400	-	-	179.216.400						179.216.400
65	PT Putra Hari Mandiri	20/KPPU-L/2010	06-10-2010	06-02-2011	427.588.500	-	-	427.588.500						427.588.500
66	PT Maju Bersama Sejati	25/KPPU-L/2010	03-10-2011	10-12-2012	97.000.000	-	-	97.000.000						97.000.000
67	PT Yani Satria Perkasa	25/KPPU-L/2010	03-10-2011	10-12-2012	97.000.000	-	-	97.000.000						97.000.000
68	PT Sepakat Tata Lestari	25/KPPU-L/2010	03-10-2011	10-12-2012	81.000.000	-	-	81.000.000						81.000.000
69	PT Syari Yulia Aryza	33/KPPU-L/2010	05-11-2010	25-11-2010	50.000.000	-	-	50.000.000						50.000.000
70	PT Sebelimbing Raya	33/KPPU-L/2010	05-11-2010	25-11-2010	50.000.000	-	-	50.000.000						50.000.000
71	Cv Anen Jaya	26/KPPU-L/2008	21-10-2008	13-11-2008	1.195.000.000	-	-	1.195.000.000						1.195.000.000
72	PT Saribina Jasa Kontrindo	34/KPPU-L/2008	28-04-2010	05-11-2010	450.000.000	-	-	450.000.000						450.000.000
73	CV Atakana	34/KPPU-L/2008	28-04-2010	05-11-2010	250.000.000	-	-	250.000.000						250.000.000
74	PT Intermatra Comperta	34/KPPU-L/2008	28-04-2010	05-11-2010	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000						1.000.000.000
75	PT Kayasa Bumi Utama	34/KPPU-L/2008	28-04-2010	05-11-2010	175.000.000	-	-	175.000.000						175.000.000
76	PT Karya Bukit Nusantara	34/KPPU-L/2008	28-04-2010	05-11-2010	9.000.000	-	-	9.000.000						9.000.000
77	PT Sumber Sinar Surya	29/KPPU-L/2010	23-11-2010	12-12-2011	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000						1.500.000.000
78	CV Simpati Jaya	29/KPPU-L/2010	23-11-2010	12-12-2011	500.000.000	-	-	500.000.000						500.000.000
79	CV Abadi Jaya	29/KPPU-L/2010	23-11-2010	12-12-2011	500.000.000	-	-	500.000.000						500.000.000
80	CV Sumber Agro Utama	29/KPPU-L/2010	23-11-2010	12-12-2011	500.000.000	-	-	500.000.000						500.000.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
81	PT Bunga Tanjung Raya	06/KPPU-L/2010	03-09-2010	23-09-2010	50.000.000	-	-	50.000.000							50.000.000
82	PT Saribina Jasa Kontrindo	28/KPPU-L/2010	22-11-2010	10-12-2010	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000							1.000.000.000
83	PT Atakana	28/KPPU-L/2010	22-11-2010	10-12-2010	500.000.000	-	-	500.000.000							500.000.000
84	PT Karya Murni Anugrah	09/KPPU-L/2010	20-10-2010	09-07-2013	355.000.000	-	-	355.000.000							355.000.000
85	KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	03/KPPU-L/2011	09-11-2011	30-07-2012	651.000.000	-	-	651.000.000	SP1	177/DH.2/VIII/2016	18-08-2016				651.000.000
86	CV Sumitama	57/KPPU-L/2008	20-04-2009	21-03-2014	85.000.000	-	-	85.000.000							85.000.000
87	CV Mitra Terang Abadi	57/KPPU-L/2008	20-04-2009	21-03-2014	160.000.000	-	-	160.000.000							160.000.000
88	CV Terang Terus	57/KPPU-L/2008	20-04-2009	21-03-2014	40.000.000	-	-	40.000.000							40.000.000
89	PT Surya Gemilang Indah	19/KPPU-L/2010	15-10-2012	01-10-2013	300.000.000	-	-	300.000.000							300.000.000
90	PT Auna Rahmat	18/KPPU-L/2007	09-04-2008	16-11-2009	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000							1.000.000.000
91	PT Hari Maju	18/KPPU-L/2007	09-04-2008	16-11-2009	300.000.000	-	-	300.000.000							300.000.000
92	PT Sri Rahayu Prasarana	07/KPPU-L/2009	21-10-2009	30-04-2014	400.000.000	-	-	400.000.000							400.000.000
93	PT Cipta Prasetya Group	07/KPPU-L/2009	21-10-2009	30-04-2014	150.000.000	-	-	150.000.000							150.000.000
94	PT Hatmo Nugroho	02/KPPU-L/2011	23-08-2011	26-08-2013	160.000.000	-	-	160.000.000							160.000.000
95	PT Permata Hati	02/KPPU-L/2011	23-08-2011	26-08-2013	35.000.000	-	-	35.000.000							35.000.000
96	PT Sumber Anugrah Raya	02/KPPU-L/2011	23-08-2011	26-08-2013	60.000.000	-	-	60.000.000							60.000.000
97	PT Prima Persada Nusantara	11/KPPU-L/2011	01-03-2012	29-04-2014	521.000.000	-	-	521.000.000	SP3	126.11/D.2.3/V/2015	20-05-2015				521.000.000
98	PT Kelsri	38/KPPU-L/2010	07-03-2011	24-02-2015	3.850.000.000	-	-	3.850.000.000	SP3	225/D.2.3/VII/2015	13-07-2015				3.850.000.000
99	PT Wahyu Wide	26/KPPU-L/2010	15-11-2010	29-01-2015	226.782.000	-	-	226.782.000	SP3	126.7/D.2.3/V/2015	20-05-2015				226.782.000
100	PT Cinta Famili	26/KPPU-L/2010	15-11-2010	29-01-2015	187.275.000	-	-	187.275.000	SP3	126.3/D.2.3/V/2015	20-05-2015				187.275.000
101	PT Alam Baru Persada	26/KPPU-L/2010	15-11-2010	29-01-2015	52.428.000	-	-	52.428.000	SP3	126.1/D.2.3/V/2015	20-05-2015				52.428.000
102	PT Surya Prima Abadi	26/KPPU-L/2010	15-11-2010	29-01-2015	574.499.000	-	-	574.499.000	SP3	126.6/D.2.3/V/2015	20-05-2015				574.499.000
103	PT Bunga Mulia Indah	26/KPPU-L/2010	15-11-2010	29-01-2015	449.844.000	-	-	449.844.000	SP3	126.2/D.2.3/V/2015	20-05-2015				449.844.000
104	PT Gajah Mada Sarana	11/KPPU-L/2014	03-02-2015	14-03-2015	583.000.000	-	-	583.000.000	SP3	226.5/D.2.3/VII/2015	14-07-2015				583.000.000
105	PT Bina Baraga Palembang	11/KPPU-L/2014	03-02-2015	14-03-2015	154.000.000	-	-	154.000.000	SP3	226.1/D.2.3/VII/2015	14-07-2015				154.000.000
106	PT Gema Pancoran Jaya	11/KPPU-L/2014	03-02-2015	14-03-2015	804.000.000	-	-	804.000.000	SP3	226.4/D.2.3/VII/2015	14-07-2015				804.000.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Kualitas Piutang				
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
107	PT Bina Hilir Utama Niaga	11/KPPU-L/2014	03-02-2015	14-03-2015	5.000.000	-	-	5.000.000	SP3	226.2/D.2.3/VII/2015	14-07-2015				5.000.000
108	PT Kharisma Tropisindo Makmur Abadi	09/KPPU-L/2011	01-05-2012	16-02-2015	125.000.000	-	-	125.000.000	SP3	409/D.2.3/XII/2015	18-12-2015				125.000.000
109	PT Graha Karya Semesta	07/KPPU-L/2012	09-07-2013	22-02-2016	4.850.000.000	-	-	4.850.000.000	SP3	203/DH.2/VIII/2016	31-08-2016				4.850.000.000
110	PT Patirindo Tama Bersama	07/KPPU-L/2012	09-07-2013	22-02-2016	9.800.000.000	-	-	9.800.000.000	SP3	202/DH.2/VIII/2016	31-08-2016				9.800.000.000
111	PT Kembar Jaya	07/KPPU-L/2011	27-12-2011	11-01-2016	735.264.000	-	-	735.264.000	SP3	90.3/DH.2/V/2016	10-05-2016				735.264.000
112	PT Tanjung Nusa Persada	07/KPPU-L/2011	27-12-2011	11-01-2016	703.296.000	-	-	703.296.000	SP3	90.1/DH.2/V/2016	10-05-2016				703.296.000
113	PT Pagar Siring Group	07/KPPU-L/2011	27-12-2011	11-01-2016	703.296.000	-	-	703.296.000	SP3	90.2/DH.2/V/2016	10-05-2016				703.296.000
114	PT Idee Murni Pratama	10/KPPU-L/2011	01-03-2012	04-04-2016	315.000.000	-	-	315.000.000	SP3	117.1/DH.2/VIII/2016	11-07-2016				315.000.000
115	PT Kakas Karya	11/KPPU-L/2015	17-05-2016	25-06-2016	256.000.000	-	-	256.000.000	SP3	587/DH.2/X/2017	12-10-2017				256.000.000
116	PT Nikita Raya	11/KPPU-L/2015	17-05-2016	25-06-2016	530.000.000	-	-	530.000.000	SP3	588/DH.2/X/2017	12-10-2017				530.000.000
117	PT Maesa Jaya	11/KPPU-L/2015	17-05-2016	25-06-2016	31.000.000	-	-	31.000.000	SP3	590/DH.2/X/2017	12-10-2017				31.000.000
118	PT Gajah Mada Sarana	05/KPPU-L/2015	21-01-2016	21-01-2016	846.151.000	-	-	846.151.000	SP3	335.10/DH.2/X/2016	31-10-2016				846.151.000
119	PT Bina Baraga Palembang	05/KPPU-L/2015	21-01-2016	21-01-2016	325.677.000	-	75.000.000	250.677.000	SP3	335.8/DH.2/X/2016	31-10-2016				250.677.000
120	PT Dwi Graha Mandiri	05/KPPU-L/2015	21-01-2016	21-01-2016	635.745.000	-	-	635.745.000	SP3	335.11/DH.2/X/2016	31-10-2016				635.745.000
121	PT Cindo Abadi Perkasa	05/KPPU-L/2015	21-01-2016	21-01-2016	935.745.000	-	-	935.745.000	SP3	335.9/DH.2/X/2016	31-10-2016				935.745.000
122	CV Kharisma Permai	03/KPPU-L/2013	23-10-2013	30-11-2015	465.013.380	-	-	465.013.380	SP3	347/DH.2/S/XI/2016	18-11-2016				465.013.380
123	CV Cemara Abadi	03/KPPU-L/2013	23-10-2013	30-11-2015	232.571.690	-	-	232.571.690	SP3	348/DH.2/S/XI/2016	18-11-2016				232.571.690
124	CV Putra Kencana Perkasa	03/KPPU-L/2013	23-10-2013	30-11-2015	232.571.690	-	-	232.571.690	SP3	346/DH.2/S/XI/2016	18-11-2016				232.571.690
125	PT Telekomunikasi Bakrie Telecom, Tbk	26/KPPU-L/2007	18-06-2008	23-08-2016	4.000.000.000	-	-	4.000.000.000	SP3	100.2/DH.2/II/2017	31-01-2017				4.000.000.000
126	PT Mobile-8 Telecom, Tbk	26/KPPU-L/2007	18-06-2008	23-08-2016	4.150.000.000	-	-	4.150.000.000	SP3	100.1/DH.2/S/II/2017	31-01-2017				4.150.000.000
127	PT Zuty Wijaya Sejati	12/KPPU-L/2013	17-09-2014	09-09-2016	2.063.000.000	-	-	2.063.000.000	SP3	594/DH.2/X/2017	12-10-2017				2.063.000.000
128	PT Menarabaja Saranasakti	12/KPPU-L/2013	17-09-2014	09-09-2016	344.000.000	-	-	344.000.000	SP3	595/DH.2/X/2017	12-10-2017				344.000.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
129	PT Handaru Adhiputra	12/KPPU-L/2013	17-09-2014	09-09-2016	22.000.000	-	-	22.000.000	SP3	596/DH.2/X/2017	12-10-2017				22.000.000
130	PT Sinatria Inti Surya	12/KPPU-L/2013	17-09-2014	09-09-2016	24.000.000	-	-	24.000.000	SP3	597/DH.2/X/2017	12-10-2017				24.000.000
131	PT Jaya Sakti Konstruksi	12/KPPU-L/2013	17-09-2014	09-09-2016	29.000.000	-	-	29.000.000	SP3	593/DH.2/X/2017	12-10-2017				29.000.000
132	PT Passokkorang	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	7.628.000.000	-	-	7.628.000.000	SP3	216/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				7.628.000.000
133	PT Aphasko Utamajaya	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	3.119.575.000	-	-	3.119.575.000	SP3	210/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				3.119.575.000
134	PT Usaha Subur Sejahtera	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	2.598.300.000	-	268.000.000	2.330.300.000	SP3	215/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				2.330.300.000
135	PT Sabar Jaya Pratama	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	2.413.400.000	-	248.000.000	2.165.400.000	SP3	214/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				2.165.400.000
136	PT Bukit Bahari Indah	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	2.513.475.000	-	-	2.513.475.000	SP3	211/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				2.513.475.000
137	PT Putra Jaya	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	1.458.650.000	-	520.000.000	938.650.000	SP3	217/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				938.650.000
138	PT Latanindo Graha Persada	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	2.122.000.000	-	111.000.000	2.011.000.000	SP3	213/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				2.011.000.000
139	PT Duta Indah Pratama Indah	09/KPPU-L/2013	20-06-2014	18-02-2016	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	SP3	212/DH.2/I/X/2016	08-09-2016				1.000.000.000
140	PT Muarabungo Plantation	01/KPPU-M/2014	08-04-2014	06-10-2016	1.249.000.000	-	-	1.249.000.000	SP3	584/DH.2/X/2017	12-10-2017				1.249.000.000
141	CV Duta Mulya Pratama	08/KPPU-L/2013	26-11-2015	16-09-2016	528.556.700	-	-	528.556.700	SP3	585/DH.2/X/2017	12-10-2017				528.556.700
142	PT Menara Fazira Abadi	08/KPPU-L/2013	26-11-2015	16-09-2016	264.278.350	-	-	264.278.350	SP3	120/DH.2/S/II/2017	16-02-2017				264.278.350
143	CV Burung Nuri	16/KPPU-L/2014	23-04-2015	13-02-2017	307.733.600	-	-	307.733.600	SP3	778.2/DH.2/S/XI/2017	14-11-2017				307.733.600
144	CV Satriya	16/KPPU-L/2014	23-04-2015	13-02-2017	65.781.000	-	-	65.781.000	SP3	370.3/DH.2/S/II/2017	18-05-2017				65.781.000
145	CV Budi Utomo	01/KPPU-L/2013	31-07-2013	14-02-2017	450.000.000	-	-	450.000.000	SP3	377/DH.2/S/V/2017	18-05-2017				450.000.000
146	PT Maju Medan Cipta	01/KPPU-L/2013	31-07-2013	14-02-2017	250.000.000	-	-	250.000.000	SP3	379/DH.2/S/V/2017	18-05-2017				250.000.000
147	CV Padang Mas	01/KPPU-L/2013	31-07-2013	14-02-2017	50.000.000	-	-	50.000.000	SP3	378/DH.2/S/V/2017	18-05-2017				50.000.000
148	PT Tompo Dalle	19/KPPU-I/2015	23-10-2017	16-02-2017	554.812.000	-	218.000.000	336.812.000	SP3	27/DH.2/S/II/2018	16-01-2018				336.812.000
149	PT Win Wahana Cipta Marga	19/KPPU-I/2015	23-10-2017	16-02-2017	725.089.800	-	-	725.089.800	SP3	26/DH.2/S/II/2018	16-01-2018				725.089.800
150	PT Ifani Dewi	04/KPPU-L/2013	24-01-2014	16-02-2017	3.904.560.000	-	-	3.904.560.000	SP3	370.2/DH.2/S/II/2017	17-05-2017				3.904.560.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
151	PT Antar Mitra Sejati	04/KPPU-L/2013	24-01-2014	16-02-2017	1.952.280.000	-	-	1.952.280.000	SP3	370.1/DH.2/S/IV/2017	17-05-2017				1.952.280.000
152	CV Belawan Indah	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	828.400.948	-	-	828.400.948	SP3	534/DH.2/VI/2017	24-07-2017				828.400.948
153	PT Mitra Jaya Bahari	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	174.618.438	-	-	174.618.438	SP3	522/DH.2/VI/2017	24-07-2017				174.618.438
154	CV Jaya Abadi Trans	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	463.024.531	-	-	463.024.531	SP3	531/DH.2/VI/2017	24-07-2017				463.024.531
155	CV Idan	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	247.120.284	-	-	247.120.284	SP3	532/DH.2/VI/2017	24-07-2017				247.120.284
156	PT Benua Samudera Logistics	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	72.759.127	-	-	72.759.127	SP3	528/DH.2/VI/2017	24-07-2017				72.759.127
157	PT Transporindo Agung Sejahtera	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	145.626.835	-	-	145.626.835	SP3	525/DH.2/VI/2017	24-07-2017				145.626.835
158	CV Wahana Multi Karsa	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	108.720.126	-	-	108.720.126	SP3	530/DH.2/VI/2017	24-07-2017				108.720.126
159	PT Berkat Nugraha Sinar Lestari	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	166.208.037	-	-	166.208.037	SP3	527/DH.2/VI/2017	24-07-2017				166.208.037
160	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	237.696.452	-	-	237.696.452	SP3	529/DH.2/VI/2017	24-07-2017				237.696.452
161	PT Tunas Jaya Utama	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	24.165.695	-	-	24.165.695	SP3	526/DH.2/VI/2017	24-07-2017				24.165.695
162	Fa Multatuli Bhakti	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	22.000.000	-	-	22.000.000	SP3	533/DH.2/VI/2017	24-07-2017				22.000.000
163	PT Lintas Samudera Jaya	06/KPPU-I/2013	31-07-2013	17-04-2017	168.208.037	-	-	168.208.037	SP3	523/DH.2/VI/2017	24-07-2017				168.208.037
164	CV Rifki Abadi	08/KPPU-L/2013	26-11-2015	16-09-2016	52.855.670	-	-	52.855.670	SP3	589/DH.2/X/2017	12-10-2017				52.855.670
165	PT Wira Karya Duta Utama	06/KPPU-L/2014	08-08-2014	08-05-2017	230.000.000	-	-	230.000.000	SP3	539/DH.2/VIII/2017	24-07-2017				230.000.000
166	PT Harida Jaya	06/KPPU-L/2014	08-08-2014	08-05-2017	103.000.000	-	-	103.000.000	SP3	542/DH.2/VIII/2017	24-07-2017				103.000.000
167	PT Wira Indo Karya Utama	06/KPPU-L/2014	08-08-2014	08-05-2017	211.000.000	-	-	211.000.000	SP3	545/DH.2/VIII/2017	24-07-2017				211.000.000
168	PT Putra Sonak Malela	06/KPPU-L/2014	08-08-2014	08-05-2017	78.000.000	-	-	78.000.000	SP3	538/DH.2/VIII/2017	24-07-2017				78.000.000
169	PT Kolega	06/KPPU-L/2014	08-08-2014	08-05-2017	108.000.000	-	-	108.000.000	SP3	543/DH.2/VIII/2017	24-07-2017				108.000.000
170	PT Faisal Contractor	06/KPPU-L/2014	08-08-2014	08-05-2017	56.000.000	-	-	56.000.000	SP3	541/DH.2/VIII/2017	24-07-2017				56.000.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
171	PT Elisabeth	06/KPPU-L/2014	08-08-2014	08-05-2017	56.000.000	-	-	56.000.000	SP3	540/DH.2/VIII/2017	24-07-2017				56.000.000
172	PT Zasiro Bastara	18/KPPU-L/2014	21-04-2015	15-08-2017	946.000.000	-	-	946.000.000	SP3	772/DH.2/S/XI/2017	14-11-2017				946.000.000
173	PT Mitra Riau Perkasa Lestari	18/KPPU-L/2014	21-04-2015	15-08-2017	105.000.000	-	-	105.000.000	SP3	774/DH.2/S/XI/2017	14-11-2017				105.000.000
174	PT Maju Bersama Jaya	02/KPPU-L/2015	02-09-2015	29-08-2017	350.300.000	-	350.300.000	-	SP3	868/DH.2/S/XI/2017	22-11-2017				-
175	PT Alam Beringin Mas	02/KPPU-L/2015	02-09-2015	29-08-2017	1.608.650.000	-	-	1.608.650.000	SP3	869/DH.2/S/XI/2017	21-11-2017				1.608.650.000
176	PT Sumber Kualastabas	02/KPPU-L/2015	02-09-2015	29-08-2017	568.457.000	-	-	568.457.000	SP3	870/DH.2/S/XI/2017	22-11-2017				568.457.000
177	PT Asa Jaya Amalia	02/KPPU-L/2015	02-09-2015	29-08-2017	448.050.000	-	-	448.050.000	SP3	872/DH.2/S/XI/2017	22-11-2017				448.050.000
178	PT Aditya Kontraktor	02/KPPU-L/2015	02-09-2015	29-08-2017	96.597.500	-	-	96.597.500	SP3	874/DH.2/S/XI/2017	22-11-2017				96.597.500
179	Suwarno Mariono	01/KPPU-L/2015	02-09-2015	18-09-2017	105.000.000	-	-	105.000.000	SP3	82/DH.2/S/II/2018	20-02-2018				105.000.000
180	Rusli	01/KPPU-L/2015	02-09-2015	18-09-2017	100.000.000	-	-	100.000.000	SP3	83/DH.2/S/II/2018	26-02-2018				100.000.000
181	Yuniani Astuti	01/KPPU-L/2015	02-09-2015	18-09-2017	1.073.000.000	-	-	1.073.000.000	SP3	81/DH.2/S/II/2018	20-02-2018				1.073.000.000
182	CV. Adi Perkasa	10/KPPU-L/2014	06-04-2015	28-11-2017	800.000.000	-	-	800.000.000	SP3	123/DH.2/S/II/2018	06-03-2018				800.000.000
183	CV Muthmainnah	10/KPPU-L/2014	06-04-2015	28-11-2017	148.000.000	-	-	148.000.000	SP3	121/DH.2/S/II/2018	06-03-2018				148.000.000
184	CV Yunico Lestari	10/KPPU-L/2014	06-04-2015	28-11-2017	154.400.000	-	-	154.400.000	SP3	120/DH.2/S/II/2018	06-03-2018				154.400.000
185	CV Biluhu Tengah Permai	10/KPPU-L/2014	06-04-2015	28-11-2017	138.000.000	-	-	138.000.000	SP3	122/DH.2/S/II/2018	06-03-2018				138.000.000
186	PT Cendana Indah Karya	13/KPPU-L/2015	21-06-2016	07-11-2017	2.265.000.000	-	-	2.265.000.000	SP3	77/DH.2/S/II/2018	20-02-2018				2.265.000.000
187	PT Res Karya	13/KPPU-L/2015	21-06-2016	07-11-2017	1.780.000.000	-	-	1.780.000.000	SP3	78/DH.2/S/II/2018	20-02-2018				1.780.000.000
188	PT Karyatama Nagasari	17/KPPU-L/2016	20-09-2017	19-10-2017	3.621.028.000	-	250.000.000	3.371.028.000	SP3	37/DH.2/S/II/2018	29-01-2018				3.371.028.000
189	PT Jasin Effrin Jaya	17/KPPU-L/2016	20-09-2017	19-10-2017	4.371.028.000	-	250.000.000	4.121.028.000	SP3	38/DH.2/S/II/2018	29-01-2018				4.121.028.000
190	PT Synergi Dua Kawan Sejati	24/KPPU-L/2016	08-08-2017	19-09-2017	1.870.400.000	-	120.000.000	1.750.400.000	SP3	948.4/DH.2/S/XII/2017	14-12-2017				1.750.400.000
191	PT Dwi Putra Unggul Pratama	24/KPPU-L/2016	08-08-2017	19-09-2017	269.100.000	-	-	269.100.000	SP3	948.2/DH.2/S/XII/2017	14-12-2017				269.100.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
192	CV Tiga Utama	24/KPPU-I/2016	08-08-2017	19-09-2017	143.100.000	-	-	143.100.000	SP3	948.1/DH.2/S/XII/2017	14-12-2017				143.100.000
193	PT Angkasa Pura Logistik	08/KPPU-L/2016	14-06-2017	27-09-2018	6.551.558.600	-	-	6.551.558.600	SP3	1065/DH.2/S/XII/2018	18-12-2018				6.551.558.600
194	CV Mahkota Baru	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	838.012.500	-	-	838.012.500	SP3	298/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				838.012.500
195	PT Dwi Tunggal Buana	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	921.813.750	-	-	921.813.750	SP3	300/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				921.813.750
196	PT Global Sarana Perkasa	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	921.813.750	-	-	921.813.750	SP3	301/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				921.813.750
197	PT Lika Dayatama	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	704.286.000	-	-	704.286.000	SP3	295/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				704.286.000
198	PT Mulya Agung Dirgantara	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	518.733.450	-	-	518.733.450	SP3	294/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				518.733.450
199	PT Tritunggal Sukses	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	921.815.730	-	-	921.815.730	SP3	302/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				921.815.730
200	CV Agro Nusa Permai	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	919.597.635	-	-	919.597.635	SP3	297/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				919.597.635
201	CV Mulia Agro Lestari	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	433.267.200	-	-	433.267.200	SP3	299/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				433.267.200
202	PT Tunas Utama Sari Perkasa	05/KPPU-I/2013	20-03-2014	09-10-2018	921.815.235	-	-	921.815.235	SP3	296/DH.2/S/II/2019	15-03-2019				921.815.235
203	PT Gayotama Leopropita	01/KPPU-I/2017	04-09-2018	15-10-2018	1.518.600.000	-	-	1.518.600.000	SP3	100/SH.2/S/II/2019	12-02-2019				1.518.600.000
204	PT Multhi Bangun Cipta Persada	01/KPPU-I/2017	04-09-2018	15-10-2018	1.712.700.000	-	-	1.712.700.000	SP3	101/SH.2/S/II/2019	12-02-2019				1.712.700.000
205	PT Matahari Abdya	01/KPPU-I/2017	04-09-2018	15-10-2018	1.106.600.000	-	-	1.106.600.000	SP3	102/SH.2/S/II/2019	12-02-2019				1.106.600.000
206	PT Andini Karya Makmur	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	1.943.717.000	-	-	1.943.717.000	SP3	309/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				1.943.717.000
207	PT Andini Persada Sejahtera	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	1.224.947.000	-	-	1.224.947.000	SP3	310/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				1.224.947.000
208	PT Agrisatwa Jayakencana	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	6.463.537.000	-	-	6.463.537.000	SP3	311/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				6.463.537.000
209	PT Andini Agro Loka	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	1.476.209.000	-	-	1.476.209.000	SP3	312/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				1.476.209.000
210	PT Austasia Stockfeed	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	4.413.346.004	-	4.413.346.004	-	SP3	313/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				-
211	PT Bina Mentari Tunggal	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	2.323.695.963	-	426.801.303	1.896.894.660	SP3	314/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				1.896.894.660
212	PT Citra Agro Buana Semesta	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	2.074.886.000	-	1.920.000.000	154.886.000	SP3	336.1/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				154.886.000
213	PT Elders Indonesia	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	2.137.576.000	-	-	2.137.576.000	SP3	315/DH.2/S/IV/2019	08-04-2019				2.137.576.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
214	PT Fortuna Megah Perkasa	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	749.558.000	-	-	749.558.000	SP3	316/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				749.558.000
215	PT Great Giant Livestock	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	9.280.374.000	-	-	9.280.374.000	SP3	317/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				9.280.374.000
216	PT Lembu Jantan Perkasa	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	3.360.963.000	-	672.192.600	2.688.770.400	SP3	318/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				2.688.770.400
217	PT Legok Makmur Lestari	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	3.944.680.000	-	-	3.944.680.000	SP3	319/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				3.944.680.000
218	PT Lemang Mesuji Lestary	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	651.544.000	-	-	651.544.000	SP3	320/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				651.544.000
219	PT Pasir Tengah	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	4.784.893.000	-	-	4.784.893.000	SP3	321/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				4.784.893.000
220	PT Rumpinary Agro Industry	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	3.310.043.000	-	-	3.310.043.000	SP3	323/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				3.310.043.000
221	PT Santosa Agrindo	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	2.727.462.496	-	2.727.462.496	-							-
222	PT Sadajiwa Niaga Indonesia	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	1.866.289.000	-	-	1.866.289.000	SP3	325/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				1.866.289.000
223	PT Septia Anugerah	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	1.148.677.000	-	-	1.148.677.000	SP3	326/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				1.148.677.000
224	PT Tanjung Unggul Mandiri	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	17.118.961.600	-	4.279.740.400	12.839.221.200	SP3	327/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				12.839.221.200
225	PT Widodo Makmur Perkasa	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	5.866.121.000	-	-	5.866.121.000	SP3	328/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				5.866.121.000
226	PT Kariyana Gita Utama	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	-	-	-	-	SKTL	02/KPPU/Ket.SKTL/I/2019	29-01-2019				-
227	PT Sukses Ganda Lestari	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	273.986.375	-	252.910.500	21.075.875	SP3	329/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				21.075.875
228	PT Nusantara Tropical Farm	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	3.835.473.000	-	-	3.835.473.000	SP3	330/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				3.835.473.000
229	PT Brahman Perkasa Sentosa	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	535.788.000	-	267.894.000	267.894.000	SP3	332/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				267.894.000
230	PT Catur Mitra Taruma	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	1.387.733.000	-	-	1.387.733.000	SP3	333/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				1.387.733.000
231	PT Kadlia Lestari Jaya	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	2.056.428.000	-	-	2.056.428.000	SP3	334/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				2.056.428.000
232	CV Mitra Agro Sangkuriang	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	852.152.000	-	-	852.152.000	SP3	335/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				852.152.000
233	PT Karunia Alam Sentosa Abad	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	257.315.000	-	220.556.400	36.758.600	SP3	337/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				36.758.600
234	CV Mitra Agro Sampurna	10/KPPU-I/2015	22-04-2016	09-01-2019	967.626.000	-	-	967.626.000	SP3	336/DH.2/S/I/V/2019	08-04-2019				967.626.000
235	PT Mellindo Bhakti Persadatama	03/KPPU-L/2018	10-01-2019	19-01-2019	1.460.666.664	-	130.416.670	1.330.249.994	SP3	390.1/DH.2/S/I/V/2019	20-05-2019				1.330.249.994
236	PT Jaya Wijaya Coperation	03/KPPU-L/2018	10-01-2019	19-01-2019	933.333.332	-	83.333.337	849.999.995	SP3	390.3/DH.2/S/I/V/2019	20-05-2019				849.999.995

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Kualitas Piutang				
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
237	PT Margo Umega	03/KPPU-L/2018	10-01-2019	19-01-2019	933.333.332	-	83.333.337	849.999.995	SP3	390.2/DH.2/S/VI/2019	20-05-2019				849.999.995
238	PT Jaya Wijaya Coperation	04/KPPU-L/2018	09-04-2019	20-05-2019	1.595.483.490	-	142.453.887	1.453.029.603	SP3	34.7/SJ.2/S/VIII/2019	20-08-2019				1.453.029.603
239	PT Margo Umega	04/KPPU-L/2018	09-04-2019	20-05-2019	933.333.332	-	83.333.337	849.999.995	SP3	34.6/SJ.2/S/VIII/2019	20-08-2019				849.999.995
240	PT Mellindo Bhakti Persadatama	05/KPPU-L/2018	09-04-2019	20-05-2019	965.999.064	-	86.249.920	879.749.144	SP3	34.4/SJ.2/S/VIII/2019	20-08-2019				879.749.144
241	PT Jaya Wijaya Coperation	05/KPPU-L/2018	09-04-2019	20-05-2019	1.014.299.064	-	90.562.420	923.736.644	SP3	34.5/SJ.2/S/VIII/2019	20-08-2019				923.736.644
242	PT Mellindo Bhakti Persadatama	06/KPPU-L/2018	09-04-2019	20-05-2019	1.075.334.650	-	96.012.027	979.322.623	SP3	34.3/SJ.2/S/VIII/2019	20-08-2019				979.322.623
243	PT. Karya Dharma Jambi Persada	18/KPPU-I/2016	19-12-2018	22-07-2019	400.000.000	-	-	400.000.000	SP3	180/SJ.2/S/XI/2019	14-11-2019				400.000.000
244	PT Hanro	18/KPPU-I/2016	19-12-2018	22-07-2019	250.000.000	-	-	250.000.000	SP3	178/SJ.2/S/XI/2019	14-11-2019				250.000.000
245	PT Bina Uli	18/KPPU-I/2016	19-12-2018	22-07-2019	250.000.000	-	-	250.000.000	SP3	179/SJ.2/S/XI/2019	14-11-2019				250.000.000
246	PT Adi Tehnik Equipindo	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	3.064.000.000	-	-	3.064.000.000	SP3	213/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				3.064.000.000
247	PT Ifani Dewi	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	9.158.000.000	-	-	9.158.000.000	SP3	216/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				9.158.000.000
248	PT Industri Kereta Api (Persero)	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	4.938.000.000	-	-	4.938.000.000	SP3	217/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				4.938.000.000
249	PT Korindo Motors	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	4.620.000.000	-	4.620.000.000	-	SKTL	13/SJ/Ket.SKTL/XII/2020	14-12-2020				-
250	PT Mobilindo Armada Cemerlang	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	4.044.000.000	-	-	4.044.000.000	SP3	220/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				4.044.000.000
251	PT Putera Adi Karyajaya	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	2.832.000.000	-	-	2.832.000.000	SP3	221/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				2.832.000.000
252	PT Putriasi Utama Sari	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	3.620.000.000	-	-	3.620.000.000	SP3	222/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				3.620.000.000
253	PT Saptaguna Dayaprima	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	5.175.000.000	-	-	5.175.000.000	SP3	224/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				5.175.000.000
254	PT Antar Mitra Sejati	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	2.225.000.000	-	-	2.225.000.000	SP3	214/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				2.225.000.000
255	PT Ibane Raja	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	937.000.000	-	-	937.000.000	SP3	215/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				937.000.000
256	PT Mayapada Auto Sempurna	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	1.425.000.000	-	100.000.000	1.325.000.000	SP3	219/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				1.325.000.000
257	PT Srikandi Metropolitan	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	910.000.000	-	-	910.000.000	SP3	225/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				910.000.000
258	PT Sugihjaya Dewantara	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	302.000.000	-	-	302.000.000	SP3	226/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				302.000.000
259	PT Viola Inovasi Berkarya	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	818.000.000	-	-	818.000.000	SP3	227/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				818.000.000
260	PT Zonda Indonesia	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	99.000.000	-	-	99.000.000	SP3	228/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				99.000.000
261	PT San Abadi	15/KPPU-I/2014	26-08-2015	26-08-2019	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000	SP3	223/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				25.000.000.000
262	PT Mustika Asahan Jaya	05/KPPU-L/2016	06-03-2017	03-09-2019	1.219.204.000	-	145.000.000	1.074.204.000	SP3	201/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				1.074.204.000
263	PT Sumber Energi Sumatera	05/KPPU-L/2016	06-03-2017	03-09-2019	1.229.204.000	-	-	1.229.204.000	SP3	200/SJ.2/XII/2019	30-12-2019				1.229.204.000
264	PT Sarana Dwi Makmur	15/KPPU-L/2015	01-09-2016	13-09-2019	4.752.570.123	-	-	4.752.570.123	SP3	161.1/SJ.2/S/XI/2019	31-10-2019				4.752.570.123

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNPB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
265	PT Pelita Bumiwangi	15/KPPU-L/2015	01-09-2016	13-09-2019	370.611.318	-	-	370.611.318	SP3	161.4/SJ.2/S/X/2019	31-10-2019				370.611.318
266	PT Hasta Karya Perdana	15/KPPU-L/2015	01-09-2016	13-09-2019	137.564.655	-	-	137.564.655	SP3	161.6/SJ.2/S/X/2019	31-10-2019				137.564.655
267	PT Jasmine Iektrindo Perkasa	15/KPPU-L/2015	01-09-2016	13-09-2019	357.573.682	-	-	357.573.682	SP3	161.3/SJ.2/S/X/2019	31-10-2019				357.573.682
268	PT Syam Putra Jaya Agung	15/KPPU-L/2015	01-09-2016	13-09-2019	189.353.365	-	-	189.353.365	SP3	161.5/SJ.2/S/X/2019	31-10-2019				189.353.365
269	PT Sarana Multi Sentosa	15/KPPU-L/2015	01-09-2016	13-09-2019	2.057.866.945	-	-	2.057.866.945	SP3	161.2/SJ.2/S/X/2019	31-10-2019				2.057.866.945
270	PT Perdana Dinamika Persada	22/KPPU-I/2015	05-09-2015	14-10-2019	1.105.616.000	-	350.000.000	755.616.000	SP3	30.3/SJ.2/S/II/2020	06-02-2020				755.616.000
271	PT Lince Romauli Raya	22/KPPU-I/2015	05-09-2015	14-10-2019	1.005.105.000	-	-	1.005.105.000	SP3	30.2/SJ.2/S/II/2019	06-02-2020				1.005.105.000
272	PT Tenaga Inti Makmu Beusare	22/KPPU-I/2015	05-09-2015	14-10-2019	804.084.000	-	50.000.000	754.084.000	SP3	30.4/SJ.2/S/II/2020	06-02-2020				754.084.000
273	PT Ciliandry Anky Abadi	05/KPPU-M/2019	22-10-2019	15-11-2019	900.000.000	-	900.000.000	-	SKTL	12/SJ/Ket.SK TL/IX/2020	23-09-2020				-
274	PT Ligas Cipta Mulia	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	SP3	36.1/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				1.500.000.000
275	PT Rajawali Sakti Kalbar	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	SP3	33.1/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				1.200.000.000
276	PT Semesta Tunggal Perkasa	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	SP3	32.2/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				1.000.000.000
277	PT Lintas Kapuas Persada	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	100.000.000	-	-	100.000.000	SP3	35.2/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				100.000.000
278	PT Mandiri Kita Perkasa	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	110.600.000	-	-	110.600.000	SP3	35.1/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				110.600.000
279	PT Arung Benua Nusantara	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000	SP3	36.2/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				1.200.000.000
280	PT Nokannayan	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	30.000.000	-	-	30.000.000	SP3	33.2/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				30.000.000
281	PT Selaras Usaha Bersama	15/KPPU-I/2016	28-08-2019	01-10-2019	75.000.000	-	-	75.000.000	SP3	32.1/SJ.2/S/II/2020	17-02-2020				75.000.000
282	Koperasi Simpan Pinjam JASA	02/KPPU-M/2018	07-12-2018	16-12-2019	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	SKTL	09/SJ/Ket.SK TL/VI/2020	04-06-2020				-
283	PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing	04/KPPU-I/2016	20-02-2017	14-01-2020	-	25.000.000.000	-	25.000.000.000	SP3	91.5/SJ.2/S/V/2020	06-05-2020				25.000.000.000
284	PT. Astra Honda Motor	04/KPPU-I/2016	20-02-2017	14-01-2020	-	22.500.000.000	-	22.500.000.000	SP3	91.4/SJ.2/S/V/2020	06-05-2020				22.500.000.000
285	PT PLN Batubara	23/KPPU-M/2019	07-04-2020	28-04-2020	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	SKTL	08/SJ/Ket.SK TL/V/2020	29-05-2020				-
286	PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk	06/KPPU-M/2017	06-09-2018	25-02-2020	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	SKTL	05/SJ/Ket.SK TL/IV/2020	30-04-2020				-
287	PT Matahari Pontianak Indah Mall	27/KPPU-M/2019	07-04-2020	28-04-2020	-	1.025.000.000	-	1.025.000.000	SP3	139/SJ.2/S/III/2020	06-08-2020				1.025.000.000
288	PT Matahari Pontianak Indah Mall	07/KPPU-M/2019	08-10-2019	02-03-2020	-	12.600.000.000	-	12.600.000.000	SP3	129.1/SJ.2/S/VII/2020	14-07-2020				12.600.000.000
289	PT Karya Mandiri Jaya Pratama	14/KPPU-L/2016	13-09-2017	26-02-2020	-	1.842.659.000	-	1.842.659.000	SP3	160.1/SJ.2/S/IX/2020	16-09-2020				1.842.659.000
290	PT Nokilalaki Sembada	14/KPPU-L/2016	13-09-2017	26-02-2020	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	SP3	160.2/SJ.2/S/IX/2020	16-09-2020				1.000.000.000

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)			Kualitas Piutang			
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
291	PT Cahya Mentari Cemerlang	14/KPPU-L/2016	13-09-2017	26-02-2020	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	SP3	160.3/SJ.2/S/IX/2020	16-09-2020				1.000.000.000
292	PT Hanro	19/KPPU-I/2016	05-12-2017	27-02-2020	-	500.000.000	-	500.000.000	SP3	91.2/SJ.2/S/V/2020	06-05-2020				500.000.000
293	PT Karya Dharma Jambi Persada	19/KPPU-I/2016	05-12-2017	27-02-2020	-	250.000.000	-	250.000.000	SP3	91.3/SJ.2/S/V/2020	06-05-2020				250.000.000
294	PT Bina Uli	19/KPPU-I/2016	05-12-2017	27-02-2020	-	250.000.000	-	250.000.000	SP3	91.1/SJ.2/S/V/2020	06-05-2020				250.000.000
295	PT FKS Multi Agro	19/KPPU-M/2019	03-02-2020	17-03-2020	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	SKTL	06/SJ/Ket.SK TL/IV/2020	30-04-2020				-
296	PT Dharmasatya Nusantara, Tbk	29/KPPU-M/2019	20-02-2020	12-03-2020	-	1.250.000.000	1.250.000.000	-	SKTL	10/SJ/Ket.SK TL/VII/2020	01-07-2020				-
297	PT Merdeka Copper Gold, Tbk	17/KPPU-M/2019	19-02-2020	12-03-2020	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	SKTL	04/SJ/Ket.SK TL/IV/2020	30-04-2020				-
298	PT FKS Multi Agro TBK	20/KPPU-M/2019	12-02-2020	05-03-2020	-	1.438.000.000	1.438.000.000	-	SKTL	07/SJ/Ket.SK TL/IV/2020	30-04-2020				-
299	PT Darma Henwa, Tbk	09/KPPU-M/2017	06-09-2018	10-03-2020	-	3.750.000.000	3.750.000.000	-	SKTL	11/SJ/Ket.SK TL/IX/2020	22-09-2020	-			-
300	PC Muriah Ltd.	04/KPPU-L/2017	19-09-2018	27-08-2020	-	1.243.000.000	-	1.243.000.000	SPN3	236/SJ.2/S/X I/2019	19-11-2020	-			1.243.000.000
301	PC Ketapang II Ltd.	04/KPPU-L/2017	19-09-2018	27-08-2020	-	1.243.000.000	-	1.243.000.000	SPN3	237/SJ.2/S/X I/2019	19-11-2020				1.243.000.000
302	PT Audison Nusantara	03/KPPU-L/2009	25-08-2009	07-11-2020	-	50.000.000	-	50.000.000	SPN2	273/SJ.2/S/X II/2020	18-12-2020		50.000.000		-
303	PT Kediri Putra	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	SPN2	266/SJ.2/S/X II/2020	16-12-2020		2.000.000.000		-
304	PT Ayem Mulya Abadi	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	SPN2	268/SJ.2/S/X II/2020	16-12-2020		1.000.000.000		-
305	PT Ayem Mulya Aspalmix	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000	SPN2	267/SJ.2/S/X II/2020	16-12-2020		1.000.000.000		-
306	PT Ratna	22/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	1.000.000.000	100.000.000	900.000.000	SPN2	265/SJ.2/S/X II/2020	16-12-2020		900.000.000		-
307	PT Tirta Investama	22/KPPU-I/2016	19-12-2017	09-09-2020	-	13.845.450.000	-	13.845.450.000	SPN3	253/SJ.2/S/X II/2020	01-12-2020			13.845.450.000	-
308	PT Balina Agung Perkasa	22/KPPU-I/2016	19-12-2017	09-09-2020	-	6.294.000.000	-	6.294.000.000	SPN3	254/SJ.2/S/X II/2020	01-12-2020			6.294.000.000	-
309	PT Berkas Yakini Gemilang	21/KPPU-I/2016	21-02-2018	01-09-2020	-	2.062.800.000	-	2.062.800.000	SPN3	252.1/SJ.2/S/XI/2020	26-11-2020			2.062.800.000	-
310	PT Surya Gemilang Indah	21/KPPU-I/2016	21-02-2018	01-09-2020	-	515.700.000	-	515.700.000	SPN3	252.2/SJ.2/S/XI/2020	26-11-2020			515.700.000	-
311	PT Duta Utama Sumatera	18/KPPU-L/2015	07-11-2016	08-10-2020	-	2.133.000.000	-	2.133.000.000	SPN2	250.2/SJ.2/XI/2020	23-11-2020		2.133.000.000		-
312	PT Raja Oloan	18/KPPU-L/2015	07-11-2016	08-10-2020	-	511.000.000	-	511.000.000	SPN2	250.3/SJ.2/XI/2020	23-11-2020		511.000.000		-
313	PT Multi Raya Arttech	18/KPPU-L/2015	07-11-2016	08-10-2020	-	761.000.000	-	761.000.000	SPN2	250.4/SJ.2/XI/2020	23-11-2020		761.000.000		-
314	PT Kediri Putra	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	3.500.000.000	-	3.500.000.000	SPN2	261/SJ.2/S/X II/2020	11-12-2020		3.500.000.000		-
315	PT Triple S Indosedulur	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	3.500.000.000	-	3.500.000.000	SPN2	262/SJ.2/S/X II/2020	11-12-2020		3.500.000.000		-
316	PT Ayem Mulya Indah	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	1.250.000.000	-	1.250.000.000	SPN2	258/SJ.2/S/X II/2020	11-12-2020		1.250.000.000		-
317	PT Ratna	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	1.250.000.000	100.000.000	1.150.000.000	SPN2	261/SJ.2/S/X II/2020	11-12-2020		1.150.000.000		-
318	PT Jatisono Multi Konstruksi	21/KPPU-I/2018	11-09-2019	03-11-2020	-	1.200.000.000	-	1.200.000.000	SPN2	259/SJ.2/S/X II/2020	11-12-2020		1.200.000.000		-
Total Piutang PNB					335.334.275.784	121.764.609.000	37.189.898.638	419.908.986.146				-	18.955.000.000	22.717.950.000	378.236.036.146

LAMPIRAN
DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang PNB: Piutang Bukan Pajak
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Pelaku Usaha	Nomor Putusan	Tanggal Penetapan Denda	Tanggal Putusan <i>Inkracht</i>	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Kualitas Piutang											
						Putusan <i>Inkracht</i> TA 2020	Pembayaran Piutang		Nomor Surat	Tanggal Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet								
Piutang PNBP lainnya Kode Akun: 115212 (Pengembalian Belanja)																						-
319	inez	TAYL			1.190.000		1.190.000	-														
320	inez	TAYL			2.649.840		2.649.840	-														
321	frans	TAYL			532.900		532.900	-														
322	KANWIL I	TAYL			135.609		135.609	-														
323	Yogi S. Wibowo	TAYL			219.572		219.572	-														
324	Wahyu Bekti Anggoro	TAYL			230.000		230.000	-														
325	Denny Julian Risakotta	TAYL			380.000		380.000	-														
326	Denny Julian Risakotta	TAYL			380.000		380.000	-														
327	Iwan Sawaluddin	TAYL			665.000		665.000	-														
328	CV Visindo Tama	TAYL			300.000		300.000	-														
329	Ukay dkk	TAYL				5.461.250		5.461.250					5.461.250									
330	Tia Medira	Apartemen				10.000.000		10.000.000					10.000.000									
331	Leonardus Andy H	Apartemen				18.000.000		18.000.000					18.000.000									
332	Kasriel Ruslim	Apartemen				13.750.000		13.750.000					13.750.000									
333	Ririn Putri Anriani	Apartemen				5.000.000		5.000.000					5.000.000									
334	Nurzanah	Gaji 13				585.000		585.000					585.000									
								-					-								-	
								-					-								-	
								-					-								-	
Total Piutang PNB					6.682.921	52.796.250	6.682.921	52.796.250					52.796.250	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total					335.340.958.705	121.817.405.250	37.196.581.559	419.961.782.396					52.796.250	18.955.000.000	22.717.950.000	378.236.036.146	378.236.036.146	378.236.036.146	378.236.036.146	378.236.036.146	378.236.036.146	378.236.036.146
												Jumlah Piutang		419.961.782.396								

Penyisihan PNB (DPU) TA 2020	Kategori Piutang	-	18.955.000.000	22.717.950.000	378.236.036.146
	% Penyisihan Piutang	0,005	0,100	0,500	1,000
	Total Penyisihan Piutang	-	1.895.500.000	11.358.975.000	378.236.036.146
Penyisihan Piutang Lainnya TA 2020	Kategori Piutang	52.796.250	-	-	-
	% Penyisihan Piutang	0,005	0,100	0,500	1,000
	Total Penyisihan Piutang	263.981	-	-	-
					391.490.775.127
Total Penyisihan					391.490.775.127

DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang: Tagihan Tuntutan Perbendaraan/Tuntutan Ganti Rugi
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Nama Pegawai	Nomor SPK/SK Pembebanan	Tanggal Pengunduran Diri / Tanggal Surat Keputusan Pembebanan	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah (Piutang 2020)	Mutasi Kurang (Pembayar-ran)	Mutasi Kurang (Reklas)	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Jumlah Angsuran	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Piutang Jangka Pendek/Bagian Lancar				Piutang Jangka Panjang			
											Tanggal Surat	Nomor Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet
Pendapatan Denda Ikatan Dinas																				
1	Bayu Seta Aji	04.14/SPK/DE/II/2007	12-02-2008	28-03-2008	9.990.129		7.546.684		2.443.445		9-Dec-09	PUPN: S-2246/SJ/XII/2009	-	-	-	2.443.445	-	-	-	-
2	Danang Wicaksono	04.15/SPK/DE/II/2007	30-06-2008	14-08-2008	9.263.636		2.727.273		6.536.363		9-Dec-09	PUPN: S-2246/SJ/XII/2009	-	-	-	6.536.363	-	-	-	-
3	Ali Nugroho	04.4/SPK/DE/II/2007	16-12-2008	30-01-2009	2.990.908		2.990.908		-		9-Dec-09	PUPN: S-2246/SJ/XII/2009	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pandoe Wicaksono	24/DE/SPK/II/2009	25-06-2009	09-08-2009	584.962				584.962		-	-	-	-	-	584.962	-	-	-	-
5	Puput Widyanti	05/DE/SPK/II/2009	02-02-2010	19-03-2010	9.020.454		2.272.727		6.747.727		28-Mar-13	PUPN: 453.I/SJ/III/2013	-	-	-	6.747.727	-	-	-	-
6	Tegar Yudha Pradhana	36/DE/SPK/I/2008	27-04-2010	11-06-2010	9.523.182		6.363.636		3.159.546		28-Mar-13	PUPN: 453.I/SJ/III/2013	-	-	-	3.159.546	-	-	-	-
7	Dani Karolustiawan	17/DE/SPK/II/2009	01-03-2010	15-04-2010	10.293.182				10.293.182		28-Mar-13	PUPN: 453.I/SJ/III/2013	-	-	-	10.293.182	-	-	-	-
8	Rakhma Ajeng Witanti	823.1/SJ/S/PK/VII/2011	01-11-2011	16-12-2011	500.000		500.000		-		8-Jul-14	PUPN: 241/SJ/VII/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Akbar Hariyadi	136/SJ/SPK/VI/2011	31-10-2013	30-01-2015	68.636.366		909.090		67.727.276		20-04-2016	PUPN: 79/SJ/S/IV/2016	-	-	-	67.727.276	-	-	-	-
10	Wiwit Widodo	95.6/SJ/SPK/VI/2010	02-02-2014	30-01-2015	65.136.363		3.545.455		61.590.908		20-04-2016	PUPN: 78/SJ/S/IV/2016	-	-	-	61.590.908	-	-	-	-
11	Verdy Ferdian	77.15/SJ/S/PK/VII/2012	03-02-2012	30-01-2015	39.363.637		10.000.000		29.363.637		20-04-2016	PUPN: 77/SJ/S/IV/2016	-	-	-	29.363.637	-	-	-	-
12	Firdausy Yustingsih	95.3/SJ/SPK/VI/2010	01-07-2015	19-08-2015	66.818.183		19.090.909		47.727.274		20-04-2016	PUPN: 81/SJ/S/IV/2016	-	-	-	47.727.274	-	-	-	-
13	Lantiko Hikma Suryatama	123/SJ/Kep/III/2016	01-03-2016	14-04-2016	70.000.000				70.000.000		21-12-2017	PUPN: 243/SJ/S/XII/2017	-	-	-	70.000.000	-	-	-	-
14	Stefino Anggara	124/SJ/Kep/III/2016	01-03-2016	14-04-2016	40.000.000				40.000.000		21-12-2017	PUPN: 244/SJ/S/XII/2017	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-
15	Vierdyan Rosawijaya	223/SJ/Kep/XI/2017	7-Nov-17	20-Dec-17	72.000.000				72.000.000		6-Aug-20	PUPN: 134/SJ.4/S/VIII/2020	-	-	-	72.000.000	-	-	-	-
16	Fintri Hapsari	228/SJ/Kep/XII/2017	28-12-2017	29-01-2018	46.500.000		6.000.000		40.500.000		-	-	40.500.000	-	-	-	-	-	-	-
17	Ridho Aulia Husein	23/SJ/SPK/XII/2016	24-Jan-18	30-04-2018	15.901.640				15.901.640		6-Aug-20	SP3: 133/SJ.4/S/VIII/2020	-	-	-	15.901.640	-	-	-	-

DAFTAR PIUTANG
Jenis Piutang: Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Nama Pegawai	Nomor SPK/SK Pembebanan	Tanggal Pengundangan Diri / Tanggal Surat Keputusan Pembebanan	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah (Piutang 2020)	Mutasi Kurang (Pembayar-ran)	Mutasi Kurang (Reklas)	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Jumlah Angsuran	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Piutang Jangka Pendek/Bagian Lancar				Piutang Jangka Panjang				
											Tanggal Surat	Nomor Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
18	Ihsan Robbani	35/SJ/SPK/XII/2016	26-Jan-18	25-02-2018	15.901.640				15.901.640		6-Aug-20	SP3: 131/SJ.4/S/VIII/2020	-	-	-	15.901.640	-	-	-	-	
19	Diah Eka Wahyuningsih	95.8/SJ/SPK/VI/2010	1-Feb-18	31-Dec-21	70.000.000		5.000.000		65.000.000		-	-	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
20	Rozilawati	133/SJ/Kep/III/2019	18-03-2019	31-12-2019	13.427.700				13.427.700		6-Aug-20	SP2: 129/SJ.4/S/VIII/2020	-	-	13.427.700	-	-	-	-		
21	Rindu Rescuemba	134/SJ/Kep/IV/2019	01-04-2019	31-12-2019	15.751.700				15.751.700		6-Aug-20	SP2: 130/SJ.4/S/VIII/2020	-	-	15.751.700	-	-	-	-		
22	Rheza Mario	97/SJ/Kep/I/2020	20-01-2020	19-02-2020	0	20.000.000	3.000.000		17.000.000		6-Aug-20	SP3: 132/SJ.4/S/VIII/2020	-	-	-	17.000.000	-	-	-	-	
23	Rima Yulia	20/KPPU/Kep.1/VI/2020	8 Juni 2020	8 Juni 2020	0	25.000.000	25.000.000		-		29-Jun-20	SKTL: 01/SJ/Ket.SKTL/VI/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Shaula Rizky Sarlita S.E.	71.64/SJ/SPK/XI/2019	16-11-2020	16-12-2020	0	25.000.000	25.000.000		-		18-11-2020	SKTL: 04/SJ/Ket.SKTL/XI/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Rizky Kurniyanto Widyasasmito S.H.	71.59/SJ/SPK/XI/2019	30-11-2020	30-12-2020	0	25.000.000	25.000.000		-		25-11-2020	SKTL: 05/SJ/Ket.SKTL/XI/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Piutang Denda Ikatan Dinas					651.603.682	95.000.000	144.946.682	0	601.657.000	0			105.500.000	0	29.179.400	466.977.600	0	0	0	-	
							0									601.657.000				-	
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara					0																
24	Syamsuddin	19/SJ/SKP/VII/2014	24-07-2014	29-08-2014	6.159.913		0		6.159.913		16-03-2015	PUPN: 35/SJ/III/2015	-	-	-	6.159.913	-	-	-	-	
Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK atas LK 2013					6.159.913	0	0	0	6.159.913					0	0	0	6.159.913	0	0	0	0
							0									6.159.913				0	
25	Adam Suryadi Nur	164/SJ/Kep/VIII/2017	16-08-2017	30-11-2017	912.500		0		912.500		06-11-2017	SPn-1: 401/SJ/M/XII/2017	-	912.500	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi Hasil Temuan SPI atas LK 2016					912.500	0	0	0	912.500					0	912.500	0	0	0	0	0	0
							0									912.500				0	
26	PT Spektrum Prima	118/SJ/Kep/VII/2018	30-07-2018	30-09-2018	26.250.000				26.250.000		08-06-2020	SP3: 91/SJ.1/S/VI/2020	-	-	-	26.250.000	-	-	-	-	
27	PT Khamochi Kataho	121/SJ/Kep/VII/2018	30-07-2018	30-09-2018	1.330.000				1.330.000		08-07-2020	SP3: 106/SJ.1/S/VII/2020	-	-	-	1.330.000	-	-	-	-	
28	PT Gladiwana Prama Sarana	120/SJ/Kep/VII/2018	30-07-2018	30-09-2018	4.800.000				4.800.000		08-07-2020	SP2: 102/SJ.1/S/VII/2020	-	-	4.800.000	-	-	-	-	-	
29	PT Spektira Performa	123/SJ/Kep/VIII/2018	20-08-2018	30-09-2018	14.250.000				14.250.000		08-07-2020	SP2: 105/SJ.1/S/VII/2020	-	-	14.250.000	-	-	-	-	-	
Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi Hasil Temuan SPI atas LK 2017					46.630.000	0	0	0	46.630.000					0	0	19.050.000	27.580.000	0	0	0	0
							0									46.630.000				0	
30	CV. Kirana Jaya Abadi	170/SJ/Kep/XI/2019	19 Nov 19	31 Des 19	4.842.100		3.050.000		1.792.100		08-07-2020	SP1: 98/SJ.1/S/VII/2020	-	1.792.100	-	-	-	-	-	-	
31	CV. Sinamot	171/SJ/Kep/XI/2019	19 Nov 19	31 Des 19	5.300.000				5.300.000		08-07-2020	SP1: 99/SJ.1/S/VII/2020	-	5.300.000	-	-	-	-	-	-	
32	CV. Surya Kencana Sakti	172/SJ/Kep/XI/2019	19 Nov 19	31 Des 19	450.000				450.000		22-07-2020	SP1: 111/SJ/S/VII/2020	-	450.000	-	-	-	-	-	-	
33	CV. Visindo Tama	173/SJ/Kep/XI/2019	19 Nov 19	31 Des 19	3.290.000				3.290.000		08-07-2020	SP1: 100/SJ.1/S/VII/2020	-	3.290.000	-	-	-	-	-	-	

DAFTAR PIUTANG
 Jenis Piutang: Tagihan Tuntutan Perbendaraan/Tuntutan Ganti Rugi
 Yang berakhir pada 31 Desember 2020

No	Nama Pegawai	Nomor SPK/SK Pembebanan	Tanggal Pengunduran Diri / Tanggal Surat Keputusan Pembebanan	Tanggal Jatuh Tempo	Saldo Awal 1 Januari 2020	Mutasi Tambah (Piutang 2020)	Mutasi Kurang (Pembayaran)	Mutasi Kurang (Reklas)	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Jumlah Angsuran	Status Surat Penagihan (terbit selama TA 2020)		Piutang Jangka Pendek/Bagian Lancar				Piutang Jangka Panjang				
											Tanggal Surat	Nomor Surat	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
34	PT. Azkia Indotama	174/SJ/Kep/XI/2019	19 Nov 19	31 Des 19	8.832.657				8.832.657	-	08-07-2020	SP1: 103/SJ.1/S/VII/2020	-	8.832.657	-	-	-	-	-	-	-
35	PT. Gladiwarna Prama Sarana	175/SJ/Kep/XI/2019	19 Nov 19	31 Des 19	4.395.600		1.100.000		3.295.600	-	08-07-2020	SP1: 101/SJ.1/S/VII/2020	-	3.295.600	-	-	-	-	-	-	-
36	PT. Khalifah Rancang Racak	176/SJ/Kep/XI/2019	19 Nov 19	31 Des 19	3.200.000				3.200.000	-	08-07-2020	SP1: 104/SJ.1/S/VII/2020	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang Tuntutan Ganti Rugi Hasil Temuan SPI Tahun 2019					30.310.357	0	4.150.000	0	26.160.357	0	0	0	0	26.160.357	0	0	0	0	0	0	0
Total					735.616.452	95.000.000	149.096.682	0	681.519.770					105.500.000	27.072.857	48.229.400	500.717.513	0	0	0	0
												Jumlah Piutang Jk Pendek				Jumlah Piutang Jk Panjang					
												681.519.770				681.519.770					
Jumlah Piutang																681.519.770					
												% Penyisihan Piutang		0,005	0,100	0,500	1,000	0,005	0,100	0,500	1,000
Penyisihan Piutang TA 2020												Penyisihan Piutang		527.500	2.707.286	24.114.700	500.717.513	-	-	-	-
												Total Penyisihan Piutang					528.066.999				

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPATABEL
PER 31 DESEMBER 2020**

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	PERALATAN DAN MESIN		5.103	32.656.872.202	21.688.809.712	3.431.061.650	(868.994.276)	24.250.877.086	8.405.995.116
3.01.03	ALAT BANTU	Unit	6	1.484.429.600	1.475.355.032	3.131.999	-	1.478.487.031	5.942.569
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Unit	29	5.801.802.500	5.538.161.714	36.176.573	-	5.574.338.287	227.464.213
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Unit	9	9.813.800	9.813.800	-	-	9.813.800	-
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Buah	1	2.900.000	36.540	290.000	-	1.305.000	1.595.000
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Buah	1	4.365.000	3.055.500	873.000	-	3.928.500	436.500
3.03.03	ALAT UKUR	Buah	9	26.224.000	1.452.000	5.244.800	-	6.696.800	19.527.200
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	Buah	2	9.350.000	9.350.000	-	-	9.350.000	-
3.05.01	ALAT KANTOR	unit	861	3.009.921.534	2.106.915.795	325.275.382	(79.725.118)	2.352.466.059	657.455.475
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Buah	2.607	8.270.673.349	4.971.761.114	1.127.770.567	(380.749.652)	5.718.782.029	2.551.891.320
3.06.01	ALAT STUDIO	Buah	145	2.118.022.464	764.433.690	312.044.100	(5.000.000)	1.071.477.790	1.046.544.674
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Buah	64	310.734.400	132.545.060	49.809.930	(49.368.000)	132.986.990	177.747.410
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	Buah	2	3.196.600	799.150	319.660	-	1.118.810	2.077.790
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Buah	25	49.604.500	49.604.500	-	-	49.604.500	-
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	Buah	19	45.142.925	26.585.074	2.788.882	(3.289.000)	26.084.956	19.057.969
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	Buah	19	149.615.384	109.807.756	9.800.635	(750.998)	118.857.393	30.757.991
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Buah	3	10.522.600	10.522.600	-	-	10.522.600	-
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Buah	693	8.195.771.106	4.371.050.804	1.239.669.463	(288.560.288)	5.322.159.979	2.873.611.127
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Buah	604	3.124.723.840	2.093.291.475	313.696.835	(61.551.220)	2.345.437.090	779.286.750
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Buah	2	20.158.600	5.039.648	2.519.824	-	7.559.472	12.599.128
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Buah	2	9.900.000	8.250.000	1.650.000	-	9.900.000	-
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		1	173.700.000	50.773.847	5.344.616	-	56.118.463	117.581.537
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	1	173.700.000	50.773.847	5.344.616	-	56.118.463	117.581.537
135111	ASET TETAP DALAM RENOVASI		7	1.369.789.158	-	-	-	-	1.369.789.158
6.07.05	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI		7	1.369.789.158	-	-	-	-	1.369.789.158
135121	ASET TETAP LAINNYA		1	5.637.500	5.637.500	-	-	5.637.500	-
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	Buah	1	5.637.500	5.637.500	-	-	5.637.500	-
TOTAL				34.205.998.860	21.745.221.059	3.436.406.266	(868.994.276)	24.312.633.049	9.893.365.811

Perkara yang Telah Terbit Putusannya pada Tingkat MA (Di Upload pada Website MA) Tahun 2020

No	Putusan KPPU				Keberatan PN			Kasasi			Status	Tanggal Upload Putusan
	Tahun	Registrasi	Tentang	Nilai Denda	Register	Amar	Nilai Denda	Registrasi	Amar	Nilai Denda		
1	2012	04/KPPU-L/2012	RS Kendari	7.644.345.000	01/Pdt.KPPU/2013/PN. Jak.Tim	Kalah	Tidak didenda	415 K/Pft.Sus-KPPU/2020	Menang	7.644.345.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	29 Juni 2020
2	2016	06/KPPU-L/2016	Hariara	8.939.000.000	318/Pdt.G.KPPU/2017/PN.JKT.SEL	Menang	8.939.000.000	5K/Pdt.Sus-KPPU/2019	Menang	8.939.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	29 Mei 2019
3	2016	07/KPPU-L/2016	Kakao	6.598.840.800	131/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Mks	Menang	6.598.840.800	1175 K/Pdt.Sus-KPPU/2018	Menang	6.598.840.800	Proses Ambil Putusan Kasasi	19 Juni 2019
4	2017	10/KPPU-I/2017	Mandala Krida	7.901.000.000	19/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Smn	Menang	7.901.000.000	893 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	7.901.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	26 November 2020
5	2018	16/KPPU-I/2018	Tender Bateballa-Jatia CS	4.066.900.000	28/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN/Blk	Menang	1.200.000.000	405 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	1.000.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	22 September 2020
6	2018	17/KPPU-I/2018	Tender Bakara-Sabbannyang	2.963.200.000	29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Blk	Menang	800.000.000	406 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	1.000.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	3 Desember 2020
7	2018	19/KPPU-I/2018	Kediri	15.536.000.000	42/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Tlg	Menang	15.536.000.000	456 K/Pdt.Sus-KPPU/2020 (Website MA)	Menang	8.400.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	26 Agustus 2020
8	2018	20/KPPU-I/2018	Kediri	5.700.000.000	43/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Tlg	Menang	5.700.000.000	458 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	4.200.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	3 Desember 2020
9	2019	01/KPPU-M/2019	PT Citra Prima Sejati	10.330.000.000	896/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Jkt.Sel	Menang	10.330.000.000	581 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	10.330.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	21 Juli 2020
10	2019	03/KPPU-M/2019	PT Citra Prima Sejati	10.330.000.000	919/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Jkt.Sel	Menang	10.330.000.000	580 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	10.330.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	26 Agustus 2020
11	2019	10/KPPU-M/2019	Merger Lumbang Capital	1.200.000.000	985/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN.Jkt.Sel	Menang	1.200.000.000	651 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	1.200.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	11 Agustus 2020
12	2019	11/KPPU-M/2019	Merger Lumbang Capital	1.250.000.000	986/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN.Jkt.Sel	Menang	1.250.000.000	579 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	1.250.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	11 Agustus 2020
13	2019	12/KPPU-M/2019	Merger Lumbang Capital	1.200.000.000	987/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN.Jkt.Sel	Menang	1.200.000.000	652 K/Pdt.Sus-KPPU/2020	Menang	1.200.000.000	Proses Ambil Putusan Kasasi	27 Agustus 2020
Total				83.659.285.800			70.984.840.800			69.993.185.800		

Perkara yang Telah Terbit Putusan di Tingkat KPPU Namun Belum Inkracht

No	Putusan KPPU				Keberatan PN			Status
	Tahun	Registrasi	Tentang	Nilai Denda	Register	Amar	Nilai Denda	
1	2006	16/KPPU-L/2006	Tender SKTM di PLN Disjaya	11.500.000.000	04/Pdt.KPPU/2007/PN.Jkt.Sel	Menang	11.500.000.000	Proses Kasasi
2	2013	10/KPPU-L/2013	Tender Alat Kedokteran Batam	1.450.000.000	01/Pdt.Sus.KPPU/2014/PN.Jkt.Tim	Menang	1.450.000.000	Proses Kasasi
3	2015	03/KPPU-L/2015	Seribu Dolok	5.875.000.000	36/pdt.sus.kppu/2016/pn.mdn	Menang	5.875.000.000	Proses Kasasi
4	2015	07/KPPU-L/2015	PLN Sumatera Utara (Medan)	24.284.303.000	448/Pdt.Sus.KPPU/2016/PN.MDN	Menang	24.284.303.000	Proses Kasasi
5	2016	16/KPPU-I/2016	SKOI	634.536.000	190/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN.Smr	Kalah	Tidak didenda	Proses Kasasi
6	2017	11/KPPU-I/2017	Sangihe Talaud	4.665.873.880	134/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Mnd	Menang	4.665.873.880	Proses Kasasi
7	2018	08/KPPU-L/2018	Freight Container	20.791.000.000	674/Pdt.G/2019/PN.Sby	Kalah	Tidak didenda	Proses Kasasi
8	2018	10/KPPU-I/2018	RS Makassar	4.753.973.000	353/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Mks	Menang	4.753.973.000	Proses Kasasi
9	2018	13/KPPU-L/2018	Tender Balige	1.800.000.000	614/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Mdn	Menang	1.800.000.000	Proses Kasasi
10	2018	14/KPPU-I/2018	Stabat Medan	3.538.000.000	682/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Niaga.Mdn			Proses Keberatan
11	2018	15/KPPU-L/2018	Maumere Pelindo III	4.200.000.000	905/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Sby	Kalah	Tidak didenda	Proses Kasasi
12	2018	18/KPPU-L/2018	Sibisa	2.253.000.000	680/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Mdn	Menang	2.253.000.000	Proses Kasasi
13	2018	23/KPPU-L/2018	Sibolga	3.260.000.000	677/Pdt.Sus.KPPU/2019/PN.Mdn	Kalah	Tidak didenda	Proses Kasasi
14	2019	28/KPPU-M/2019	Merger Farmindo	2.250.000.000	219/Pdt.Sus.KPPU/2020/PN.Jkt.Utr	Menang	2.250.000.000	Proses Kasasi
15	2019	13/KPPU-I/2019	Perkara Grab (ASK)	49.000.000.000	468/Pdt.Sus.KPPU/2020/PN.Jkt.Sel	Kalah	Tidak didenda	Proses Kasasi
16	2019	15/KPPU-I/2019	Perkara Tiket	Tidak didenda	365/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst	Kalah	Tidak didenda	Proses Kasasi
17	2019	14/KPPU-L/2019	SPAM Lampung	7.948.000.000	161/Pdt.Sus.Online.KPPU/2020/PN.Jkt.Pst	Menang	7.948.000.000	Proses Kasasi
Total				148.203.685.880			66.780.149.880	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jl. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120

Website | www.kppu.go.id
Email | infokom@kppu.go.id

KANWIL I

Jalan Gatot Subroto No.148 B,
Sekip, Medan Petisah
Kota Medan, Sumatera Utara
201113
Telp. : 061-4558133 / 88741230
Faks : 061-4148603
email:kpd_medan@kppu.go.id/
kanwil1@kppu.go.id

KANWIL II

Jl. Diponegoro, Kel Sumur Batu, Kec
Teluk Betung Utara, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35212
Telp. : 0721-6013235
Faks. : 0721-6016498
email : kanwil2@kppu.go.id

KANWIL III

Jl. PH. H. Mustofa No.22
Kota Bandung
Jawa Barat 40124
Telp. : 022-20506680
Faks. : 022-20506680
email : kanwil3@kppu.go.id

KANWIL IV

Gedung Mandiri
Jl. Basuki Rahmat No.129-137 Lt.7
Surabaya 60271.
Telp. : 031-545 4146, 534 4410
Faks : 031-5341949
email:kpd_surabaya@kppu.go.id/
kanwil4@kppu.go.id

KANWIL V

Gedung Keuangan Negara (GKN)
Balikpapan Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.28,
Balikpapan
Kalimatan Timur 76113
Telp. : 0542-730373
Faks : 0542-415-939
email:kpd_balikpapan@kppu.go.id
/ kanwil5@kppu.go.id

KANWIL VI

Gedung Keuangan Negara II Lt.6
Jl. Urip Sumoharjo KM.4
Makassar, Sulawesi Selatan.
Telp. : 0411-429927/429957
Faks. : 0411-429958
email:kpd_makassar@kppu.go.id/
kanwil6@kppu.go.id